



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR RI
DENGAN KEPALA BPOM RI**

- Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Kamis, 15 Mei 2025
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Acara : 1. Membahas penguatan pengawasan obat dan makanan, termasuk laporan temuan pengawasan terkini;
2. Membahas penguatan regulasi dan pengawasan informasi publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor obat dan makanan;
3. Mengkaji peran BPOM dalam menjaga kualitas dan keamanan obat dan bahan baku obat dalam tantangan regulasi internasional.
- Waktu : Pukul 10.45 s.d. 13.22 WIB
Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, S.E (Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. NASDEM)
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI)
- Hadir : **A. PIMPINAN DAN ANGGOTA:**
25 orang Anggota hadir dari 43 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:
- I. PIMPINAN:**
1. Felly Estelita Runtuwene, S.E (Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. NASDEM)
 2. Charles Honoris (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-PDI PERJUANGAN)
 3. drg. Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GERINDRA)
 4. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-PKB)

II. ANGGOTA:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

6 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP.,M.Kep
2. Sukur H. Nababan, S.T.
3. Indah Kurnia, S.E., M.M.
4. Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA., M.B.A.
5. Obet Rumburen
6. Eko Kurnia Ningsih

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F-P. GOLKAR)**

2 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Ranny Fahd Arafiq
2. Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M.

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA (F-P. GERINDRA)**

1 orang Anggota dari 5 Anggota

1. Ade Rezki Pratama, S.E., M.M

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
(F-P. NASDEM)**

1 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Nurhadi, S.Pd., M.H.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F-PKB)**

4 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Zainul Munasichin
2. Asep Romy Romaya
3. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I.,
M.M.
4. Dr. Arzeti Bilbina Setyawan, S.E.,
M.A.P

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(F-PKS)**

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si
2. drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si
3. Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)**

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag
2. Ir. H. Sahidin
3. Surya Utama, S.I.P

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
(F-P. DEMOKRAT)**

1 orang Anggota dari 3 Anggota

1. dr. Hj. Cellica Nurrachadiana

B. UNDANGAN

1. Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D. (Kepala BPOM RI)
2. Irjen Pol. Dr. Jayadi, S.I.K., M.H. (Sekretaris Utama BPOM RI)
3. Yan Setiadi, Ak., M.B.A. (Inspektur Utama BPOM RI)
4. Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si. (Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif)
5. Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm. (Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik)
6. Dra. Elin Herlina, Apt., M.P. (Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan)
7. Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos. (Deputi Bidang Penindakan)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Bapak/Ibu, kita mulai, ya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

**Yang kami hormati Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI,
Yang kami hormati Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan beserta
jajarannya, beserta Hadirin yang berbahagia.**

Tentu, patut kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di mana kita diberikan lagi kesempatan boleh ada di ruang rapat Komisi IX untuk membicarakan hal-hal yang penting untuk masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi IX DPR RI yang telah hadir berjumlah 22 dari 43 anggota, yang terdiri dari 8 fraksi dari 8 fraksi yang ada. Dengan demikian, kuorum, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa, "Setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup." Oleh karena itu, saya minta persetujuan Bapak/Ibu untuk rapat ini adalah rapat terbuka, Bapak/Ibu.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB)

Bapak/Ibu.

Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.

(BERDOA)

Berdoa selesai.

Mengenai waktu, Bapak/Ibu, saya tawarkan sekarang ini sudah pukul 10.47, sampai pukul 12.00 bagaimana, Bapak/Ibu?

(RAPAT: SETUJU)

Adapun agenda Rapat Dengar Pendapat pada hari ini adalah membahas penguatan pengawasan obat dan makanan, termasuk laporan temuan pengawasan terkini. Yang kedua, membahas penguatan regulasi dan pengawasan informasi publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor obat dan makanan, dan poin ketiga, mengkaji peran Badan POM dalam menjaga kualitas dan keamanan obat dan bahan baku obat dalam tantangan regulasi internasional.

Sebelum mendengarkan paparan dari Kepala Badan, kita sepakati bahwa paparan boleh kurang lebih 25 menit? Cukup, Pak Kepala Badan? Bapak/Ibu, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Untuk itu, waktu yang berharga ini kami berikan kepada Bapak Kepala Badan untuk menyampaikan pemaparannya. Kami persilakan.

KEPALA BPOM RI (Prof. Dr. TARUNA IKRAR, M. Biomed., Ph.D.):

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

**Yang terhormat, Pimpinan dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,
Yang terhormat, Bapak/Ibu Anggota Komisi IX DPR RI.**

Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Taala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat sehingga hari ini kami dapat memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IX DPR RI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan undangan tersebut, ada tiga hal yang menjadi kewajiban kami yang kami tampilkan dalam *outline* tersebut. Pertama, yaitu kami akan memberikan paparan berhubungan dengan penguatan pengawasan obat dan makanan, termasuk laporan penemuan pengawasan terkini. Yang kedua, penguatan regulasi dan pengawasan informasi publik untuk peningkatan transparansi akuntabilitas di sektor obat dan makanan, dan yang ketiga, peran Badan POM dalam menjaga kualitas dan keamanan obat dan bahan baku obat dalam tantangan regulasi internasional.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Kita tahu bahwa berdasarkan tugas, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, demikian pula Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Obat dan Makanan itu memiliki tanggung jawab seluruh produk *life cycle* obat dan makanan dari hulu sampai hilir. Kita tahu mulai dari industri obat, uji praklinis, uji klinis, uji kualitas, uji produk hingga registrasinya, sampai dengan pemaparan bagaimana mendapatkan nomor izin edar, kemudian distribusinya, ekspor-impornya, dan terakhir pada *post-market*-nya juga menjadi tanggung jawab Badan POM yang hubungannya dengan labelnya, distribusinya, penjualannya, dan seterusnya. Jadi, berdasarkan itu, hingga pada tingkat terakhir penindakannya. Oleh karena itu,

kenapa di Badan POM ada Deputi Penindakan yang diwakili dengan 4 direktorat: Siber, Cegah Tangkal, sampai Penyidikan, dan Intelijen tentu karena peran yang diberikan oleh negara kepada Badan POM yang punya otoritas yang cukup memadai.

Pada *slide* berikutnya kami menjelaskan berdasarkan kinerja pengawasan obat dan makanan, merupakan data yang kami dapatkan dari tahun 2024 dan 2025. Kita saksikan di sini bahwa jumlah nomor izin edar obat dan makanan telah dikeluarkan oleh Badan POM pada 2024 dan 2025 hingga triwulan pertama, bisa terdata bahwa obat yang sebelumnya adalah, misalnya, kita saksikan rata-rata capaian registrasi obat dan makanan tahun 2024 adalah sebesar 156,8%. Pada triwulan pertama 2024 sebesar 37,3% dan pada triwulan pertama 2025 sebesar 37,9%. Jadi, menunjukkan ada peningkatan sekitar 0,6% dari dibanding tahun sebelumnya.

Pada *slide* berikutnya kami lihat bahwa kinerja Badan Obat dan Makanan yang berhubungan dengan sarana produksi dan distribusi, kami juga di sini menampilkan capaian pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan pada tahun 2024 sebesar 106,4%, dan kalau kita lihat perkembangan dari triwulan pertama tahun 2024 dibandingkan triwulan pertama tahun 2025, itu sebesar, khusus untuk sarana produksi, yaitu dari 20,6% di triwulan pertama tahun 2025 sebesar 12,1%. Nah, tampaknya terdapat penurunan jumlah sarana produksi dan distribusi.

Kemudian kalau kita lihat sarana distribusi yang diperiksa, untuk capaian pemeriksaan kita saksikan pada tahun 2024 atau tahun lalu kita 105,9%, dan tahun 2025 ini untuk triwulan pertama kita saksikan juga terdapat 14,3% tahun 2025, sementara pembandingnya 2024 sebesar 24,7%. Nah, kita akan eksplorasi kenapa terdapat penurunan seperti itu.

Kemudian, pada *sampling* pengujian obat dan makanan, kami menargetkan pada rata-rata capaian *sampling* dan pengujian obat makanan tahun 2024 sebesar lebih dari 100%, yaitu 101,5%. Nah, kalau di triwulan pertama 2024 sebesar 22, sementara triwulan kedua mengalami penurunan, yaitu menjadi 11,3%. Tentu, kita kan masih di triwulan pertama, kita berharap nanti kita bisa mengejar pada triwulan-triwulan berikutnya sehingga nanti capaian kesuksesan tahun lalu bisa kita capai kembali di tahun ini.

Pada *slide* berikutnya, kita dapatkan tentang kinerja pengawasan obat dan makanan yang hubungannya dengan penyidikan obat dan makanan. Pada triwulan pertama tahun 2025, kita tahu bahwa realisasi pada tahun 2024 sebanyak 60 perkara dari target 282 perkara sehingga capaiannya sebesar 23%, sedangkan realisasi hingga triwulan pertama 2025 sebanyak 36 perkara dari target 187 perkara sehingga capaiannya sebesar 19%. Jadi, dalam konteks ini kita bisa menyaksikan bahwa terdapat tahun 2024 jumlah perkara obat sebanyak 35, obat tradisional 7, kosmetik ada 18, dan pangan olahan ada 4, sedangkan pada tahun

2025 hingga triwulan pertama jumlah perkara obat sebanyak 20, obat tradisional 4, dan kosmetik ada 11 dan pangan olahan ada 1.

Kinerja pengawasan obat dan makanan yang hubungannya dengan hasil patroli siber, ini juga penting kami laporkan, karena ternyata pada hasil siber kami, kami temukan bahwa jumlah *takedown* untuk obat pada tahun, triwulan pertama 2024 sebanyak 33.863 *link*. Hingga akhir tahun 2024 sebanyak 88.043 *link*, sedangkan hingga triwulan pertama adalah 8.118 *link*. Nah, jumlah *takedown* untuk obat bahan alam juga mengalami perubahan dari tahun 2024 sebanyak 40.573 *link*, sedangkan hingga triwulan pertama 2024 sebanyak 8.043 *link*, dan jumlah *takedown* suplemen kita juga saksikan dari tahun 2024 sebanyak 4.051 *link* hingga akhir tahun 2024 sebanyak 19.000 *link*, sedangkan hingga triwulan pertama 2024 sebanyak 2.402 *link*. Nah, jumlah *takedown* untuk pangan olahan triwulan pertama 2024 sebanyak 34.095 *link*, hingga akhir tahun 2024 sebanyak 94.615 *link* sehingga untuk triwulan satu 2025 sebanyak 9.138 *link*.

Nah, untuk isu terkini pengawasan obat, pada *next slide*, kita temukan bahwa berbicara tentang obat, ada hal-hal yang cukup prinsip yang kita mau lakukan. Bahwa ada tiga hal yang kita saksikan, yaitu pengawasan peredaran ketamin, yang kedua tentang *advanced therapy medicinal product*, kemudian yang ketiga tentang garam farmasi.

Pada paparan ini kita tunjukkan bahwa terdapat peningkatan penyerahan ketamin injeksi ke fasilitas pelayanan kefarmasian khususnya ke apotek dalam periode tahun 2022 sampai 2024. Nah, dalam konteks itulah, maka Badan POM melakukan kajian regulasi, karena terdapat penyimpangan. Kalau kita melihat dari tahun 2022 itu 134, sementara tahun 2024 itu 440, maka 440 berarti terdapat peningkatan signifikan penyaluran ketamin injeksi ke fasilitas pelayanan kefarmasian. Kemudian, yang berhubungan dengan tren data penyaluran ketamin injeksi ke apotek yang tahun 2022 itu sekitar 3, kemudian tahun 2024 menjadi 152. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat untuk ketamin terdapat peningkatan yang sangat signifikan.

Nah, kemudian tentang *advanced therapy medicinal product* di Indonesia. Ada 34 sarana mendapat asistensi regulasi, 5 sarana sudah mendapatkan tersertifikasi. Dan oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga telah menerbitkan regulasi yang berhubungan dengan ini, yaitu Nomor 8 Tahun 2025 Peraturan Kepala Badan POM.

Yang berikutnya yang kami ingin jelaskan tentang garam farmasi.

Bapak/Ibu Anggota Komisi XI yang kami hormati.

Bahwa sudah ada empat industri garam farmasi yang tersertifikasi CPOB. Ini hal yang menarik, bahwa khusus untuk garam farmasi yang contohnya seperti larutan infus dan sebagainya, sesuai dengan Peraturan Presiden, bahwa sudah

dilarang untuk mengimpor garam, termasuk garam farmasi. Nah, oleh karena itu, maka strategi yang dilakukan oleh Badan POM adalah bagaimana produksi dalam negeri garam farmasi itu bisa dijalankan dan dengan gerak cepat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan kami melakukan asistensi sehingga produksi yang dalam negeri itu sebetulnya sudah bisa terpenuhi dengan lahirnya empat industri garam farmasi yang tersertifikasi CPOB yang dalam waktu sangat singkat, kurang dari setahun, dan kita berharap kebutuhan garam farmasi ini bisa terpenuhi dari keempat industri farmasi dalam negeri.

Selanjutnya, pada isu terkini yang hubungannya dengan pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Kita tahu beberapa saat terakhir ini hubungannya dengan ulasan *influencer*, kemudian maraknya produk impor, pelanggaran kontrak produksi, dan sebagainya. Pada data ini, kami ingin tampilkan bahwa yang berhubungan dengan ulasan *influencer*, konten berupa hasil uji tidak komprehensif dan klaim *approval by*, dan konten menimbulkan keresahan masyarakat dan turunan daya saing produksi lokal. Oleh karena itu, berdasarkan juga rekomendasi dari Komisi IX berapa saat yang lalu, kami telah mengharmonisasi aturan yang khusus tentang *influencer* pengawasan obat dan makanan ini.

Kemudian yang berikutnya tentang maraknya produk impor. Produk impor ilegal yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu tanpa SKI memasuki jalur ilegal, itu kita melihat telah melakukan penegakan sanksi administrasi yang lebih tegas. Intensifikasi pengawasan dan penindakan kami temukan kurang lebih 20 miliar yang mengandung bahan berbahaya tahun 2024 yang telah kami tindak. Kemudian, tentang pelanggaran kontrak produksi, yaitu produk ilegal mengandung bahan-bahan kimia obat atau bahan yang dilarang atau produk yang palsu, yaitu produk yang membahayakan kesehatan dan turunan dan daya saing produk, kami telah melakukan berbagai tindakan-tindakan dari seluruh organ dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dari seluruh Indonesia yang telah kita lakukan penindakan seperti dengan 35 *item* kosmetik kontrak (2024).

Kemudian tentang peredaran produk yang mengandung bahan kimia obat yang bahan dilarang, yaitu obat yang mengandung bahan kimia obat pada produksi klaim stamina pria, yang pelangsing, dan pegal linu, dan sebagainya juga telah kami lakukan beberapa penindakan dan enam obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat kami lakukan penindakan.

Selanjutnya untuk isu terkini mengenai pengawasan pangan olahan. Saya kira, *next slide*. Pada *slide* berikutnya kita lihat isu terkini pengawasan pangan olahan, ada tiga hal yang kami ingin sampaikan kepada para hadirin yang terhormat, yaitu tentang es krim yang mengandung alkohol. Badan POM menemukan beberapa gerai es krim yang menjual es krim yang mengandung alkohol seperti ini Hey Nick's Ice Cream, Topsy, Vilo, dan penjualan tersebut tidak memenuhi ketentuan dan tata niaga minuman beralkohol dan tidak ada informasi yang jelas tentang kandungan alkohol pada produk tersebut sehingga Badan POM

akan melakukan tinjau ulang terhadap persetujuan izin edarnya untuk produk yang mengandung, agar label produk mengikuti ketentuan minuman beralkohol. Diperlukan *review* regulasi penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Yang kedua tentang hasil pengawasan pangan olahan mengandung unsur babi. Ini juga menjadi perhatian masyarakat luas. Sesuai dengan kewenangan sertifikasi halal ada di BPJPH, Badan POM memiliki perjanjian kerja sama dengan BPJPH tentang pengawasan jaminan produk halal di bidang obat dan makanan. Seluruh UPT Badan POM melakukan *risk-based sampling* dalam rangka pengawasan keamanan hasil pangan termasuk kesesuaian label produk halal. Hasil pengawasan dikoordinasikan secara intensif oleh BPJPH dan BPJPH menindaklanjuti hasil pengawasan dengan melakukan uji verifikasi dan seterusnya. Dalam hal ini telah diumumkan oleh BPJPH tentang beberapa produk tentunya dan itu hasil kerja sama dari Badan POM. Kami menjalankan otoritas yang kami miliki dan ditindaklanjuti oleh BPJPH.

Kemudian, hal lain juga yang cukup krusial sekarang ini tentang dukungan Program Makan Bergizi Gratis. Kita tahu sesuai dengan tugas dan fungsi peran Badan POM adalah pengawalan keamanan pangan olahan untuk terjaminnya makanan terkontaminasi zat kimia dan mikroorganisme. Sebagai payung kerja sama Badan POM dengan BGN telah menandatangani MoU mengenai sinergi Program Makan Bergizi Gratis.

Pada *slide* berikutnya, program pendukung yang perlu diintegrasikan dengan pemberian makanan bergizi gratis. Kita tahu bahwa ini merupakan program prioritas Bapak Presiden Republik Indonesia dan Badan POM punya komitmen untuk *men-support* secara maksimal. Oleh karena itu, dalam mendukung Program MBG berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025—2029 sesuai dengan tugas fungsi Badan POM diminta pengawalan keamanan pangan MBG yang meliputi, jadi, tugas kami di MBG yaitu pengawasan mutu dan keamanan makanan, yang kedua pengembangan modul dan penyelenggaraan pelatihan penjamin makanan sehingga kita memiliki tenaga yang siap untuk menjalankan program ini.

Time frame kegiatan Badan POM terkait MBG. Koordinasi antara kementerian dan lembaga semua untuk mendukung MBG dalam bentuk pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia dan Badan POM telah berpartisipasi untuk menyiapkan tenaga tersebut. Sebagai contoh, tahun 2024—2025 telah dibentuk 750 narasumber, termasuk dari Badan POM telah dilaksanakan dua *batch* pembekalan SPPI. Total yang kami telah *support* yaitu ada 2.000 orang SPPI, yang telah kami latih bersama tentu dengan tim terkait.

Dari konteks itu, hingga Januari 2025 kami telah melakukan pengawalan keamanan pangan uji coba 6—15 Januari, terus juga melakukan pemantauan MBG di 16 Januari sampai sekarang. Bahkan kita melakukan *kick off* evaluasi

MBG. Bahkan kita juga sudah menandatangani MoU antara Badan POM dengan MBG tanggal 23 Januari.

Nah, dengan konteks itu, maka kami optimis Badan POM bisa menjalankan tugasnya dan tupoksinya untuk pelaksanaan MBG tersebut. Pada *slide* tersebut, penandatanganan komitmen ini menunjukkan bahwa ada beberapa *item* yang menjadi tugas-tugas Badan POM. Pertama, berhubungan dengan pedoman mitigasi, kemudian pendampingan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, juga kami melaksanakan pengawasan keamanan pangan, kami melakukan juga *sampling*, kami melakukan rantai pasok kompetensi penjamin pangan, kemudian kami juga melakukan kapasitas laboratorium, kemudian tindak lanjut pengawasan, kompetensi sumber daya manusia, dan terakhir hingga pertukaran data. Itulah menjadi poin-poin kesepakatan kami dengan MBG.

Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan itu, usulan kegiatan pengawalan MBG oleh Badan POM yaitu, satu, penyusunan pedoman mitigasi dan komunikasi risiko. Itu telah kami jalankan. Terus, kolaborasi dengan Universitas Pertahanan dalam pembentukan SPPI, kami juga telah menjalankan. Kemudian ToT pengajar SPPI dan pelatih pengelolaan pangan di SPPG kami juga *on progress* kami jalankan. Peningkatan budaya keamanan pangan lewat komunikasi informasi kami telah laksanakan. Pendampingan penerapan CPPOB dan SPPG, kemudian pengawasan keamanan pangan *sampling* juga kami telah lakukan baik secara acak maupun pengajuan *sampling* kasus kejadian luar biasa juga kami telah memiliki data. Terus pengawasan rantai pasok *monitoring* pengembangan metode analisa, hingga kapasitas dan penjaminan sistem ketertelusuran peralatan pengujian. Asumsi itu kita lakukan dengan asumsi kita bisa dari badan POM *mem-backup* secara maksimal MBG tersebut.

Nah, kejadian luar biasa keracunan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025, menurut data yang kami miliki, bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang terintegrasi. Dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini, supaya berikutnya tidak terjadi lagi. Ya, itu juga kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri, suhu, kondisi makanan, proses. Contohnya, ada beberapa makanan yang dimasak terlalu cepat sehingga lambat didistribusikan sehingga menimbulkan kejadian luar biasa atau *poisoning* kepada adik-anak kita.

Kemudian, ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan *hygiene* sanitasi. Nah, ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki. Badan POM tentu berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada petugas yang khususnya berhubungan dengan dapur-dapur yang berhubungan menyiapkan MBG tersebut.

Pada *slide* berikutnya tentang kita belajar apa yang terjadi atau *lesson learning* Program MBG. Kita dapatkan bahwa data epidemiologi yang tidak lengkap. Itu perlu kita lengkapi. Terus kita juga belajar ketidaksesuaian parameter uji. Ini juga perlu menjadi perhatian untuk evaluasi bagaimana Program MBG ke depan bisa semakin berjalan lebih baik supaya terhindar dari kejadian luar biasa.

Parameter uji yang digunakan tidak spesifik. Ini juga perlu kita sampaikan nanti ke Badan Gizi supaya Badan Gizi lebih memprioritaskan. Yang penting juga yaitu penerapan CPPOB belum optimal. Artinya, dapur-dapurnya atau cara pembuatan pangan ini yang menurut evaluasi kami belum sesuai standar. Terus penjamin keamanan bahan baku tidak optimal. Nah, dengan konteks belajar dari kondisi ini maka Badan Pengawas Obat berkomitmen akan semakin mempererat kerja sama kami dengan Badan Gizi, supaya mencegah kejadian luar biasa yang bisa terjadi di masa-masa yang akan datang.

Strategi penguatan pengawasan obat dan makanan. Penguatan regulasi kami rencanakan yaitu mengeluarkan Peraturan Badan POM tentang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui peran serta masyarakat termasuk aturan untuk peran *influencer*. Ini sekarang *on progress* sudah harmonisasi. Mudah-mudahan, dalam waktu yang tidak terlalu lama aturan ini telah diundangkan.

Kemudian, yang berhubungan tentang *advance medicine*. Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Produk Terapi sebagai panduan bagi *evaluator* pelaku usaha kami telah undangkan telah tercatat di lembaran negara.

Kemudian, Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Kajian Risiko Keamanan Mutu Obat dan Bahan Obat juga ini penguatan regulasi terkait ketamin kami juga sudah undangkan, karena sepertiga barang tadi, ketamin, kalau disalahgunakan ini kan jenis obat bius dan berbahaya. Jadi, kami masukkan sebagai obat-obat tertentu sehingga ada sanksi hukumnya kalau disalahgunakan.

Kemudian Badan POM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, termasuk ketamin kami juga sudah undangkan.

Kemudian Rencana Rancangan Revisi Per-BPOM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis. Ini juga perlu kami sampaikan, karena persetujuan uji klinis itu kita masih mengalami sangat kecil jumlah uji klinis yang ada di negeri kita. Kita, sampai bulan ini, kami baru menandatangani sekitar 12 uji klinis. Seharusnya, kalau dibanding dengan negara-negara tetangga, itu taruhlah misalnya Vietnam, itu sudah lebih 100. Kalau Amerika ribuan uji klinis setiap tahun dilakukan. Nah, itu kita, salah satunya, saya kira, Peraturan Badan POM tentang Laksana Uji Klinis ini perlu kita evaluasi kembali.

Terus, rencana revisi Per-BPOM Nomor 17 tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik. Ini perlu kita revisi.

Slide berikutnya. Sebelumnya ada intensifikasi sistem regulator, kemudian perluasan tentang konsep MBG. Tadi kami sudah jelaskan juga.

Kemudian ekosistem layanan pengawasan obat dan makanan.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Konsolidasi seluruh layanan digital Badan POM ke portal nasional dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 82 2023, Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital dalam melakukan upaya-upaya ekosistem layanan obat dan makanan.

Sebagai contoh, integrasi dan interoperabilitas Badan POM dengan instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah dilakukan dengan keterhubungan *gateway system* sebagai berikut: satu, misalnya tentang *gateway* Indonesia National Single Window melalui sistem informasi e-BPOM. Kemudian, yang kedua juga sudah *gateway* modul penerimaan negara generasi ketiga melalui sistem informasi e-Payment. Terus, *gateway* tanda tangan elektronik melalui sistem informasi e-sign, *gateway* OSS melalui sistem informasi OSS RBA, dan *gateway* vaksin dan Sistem Monitoring Imunisasi Logistik Elektronik atau SMILE. Kami telah lakukan semuanya. Mudah-mudahan, ini bisa meningkatkan kami punya pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, *slide* berikut tentang peran laboratorium Badan POM.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Penguatan laboratorium internal perlu kita maksimalkan, karena kemampuan Badan POM melalui akreditasi lab sesuai dengan ISO dan IEC telah terstandarisasi dengan kemampuan laboratorium berdasarkan lingkup pengawasan Badan POM. Kami, dalam konteks ini mengetahui bahwa regionalisasi sistem selama ini itu ada tujuh saja. Sekarang kami tingkatkan sudah bertambah menjadi delapan. Jadi, dulu di kawasan timur itu cuma ada satu kita pusatkan di Manado dan sekarang kita tambah lagi satu supaya yang paling timur untuk Irian regionalisasinya, yaitu di Irian Jaya.

Kemudian, perkuatan laboratorium eksternal juga melalui rekognisi. Kami mempunyai strategi di mana laboratorium-laboratorium yang ada di luar Badan POM kita memberikan sertifikasi atau rekognisi. Misalnya, laboratorium yang ada di kampus atau laboratorium-laboratorium swasta bisa menjadi yang meneliti tentang obat, mengevaluasi tentang standarisasi dan sebagainya kita memberikan rekognisi sehingga dengan demikian, terstandarisasi secara nasional.

Slide berikutnya tentang penguatan regulasi dan pengawasan informasi publik. Ini untuk menjawab *outline* kedua yang berhubungan dengan pertanyaan Ketua dan Wakil Ketua Anggota Komisi IX. Pada isu keterbukaan, regulasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan POM, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61, dan selanjutnya tentang regulasi yang diterbitkan oleh Badan POM, Badan POM telah menghasilkan beberapa regulasi yang merupakan turunan dari peraturan-peraturan tersebut. Misalnya, Peraturan Badan POM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik telah kami lakukan.

Slide berikutnya.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Yaitu penguatan keterbukaan informasi publik yang hubungannya dengan komitmen Badan POM dalam penguatan keterbukaan informasi publik. Capaian Badan POM dalam keterbukaan informasi publik yaitu kami telah mendapatkan predikat informasi dari Komisi Informasi Pusat selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2020 hingga 2024 dan peringkat satu kategori lembaga LPNK 2023 dan 2024. Hasil monev internal 78,64% PPID Pelaksanaan, yaitu 81 dari 103 unit kerja pusat meraih predikat informatif. Nah, dari layanan pemerintah informasi PPID di lingkungan Badan POM, kita lihat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan. Pada triwulan pertama tahun 2025 ini, kami telah mendapatkan 85 dari SLA 3,76 hari kerja. Nah, jadi di konteks itu dari pelayanan masyarakat, permintaan informasi obat dan makanan melalui *contact center* sesuai dengan anjuran, kami juga telah melaksanakannya dengan baik.

Yang ketiga, tentu yaitu peran Badan POM dalam menjaga kualitas dan keamanan obat dan bahan baku dalam tantangan internasional. Bapak/Ibu yang kami hormati, pada *slide* berikutnya kami tunjukkan bahwa Badan POM menuju WHO Listed Authorities. Kita tahu bahwa ada sembilan yang menjadi penilaian penting Badan POM sekarang. Mudah-mudahan, *insya Allah*, di tahun ini kita mendapatkan WLA. Apa pentingnya WLA? WLA ini merupakan WHO Listed Authorities yang merupakan suatu reputasi regulator yang sangat terhormat di dunia internasional. Kita mengetahui bahwa untuk mendapatkan WLA ini sangat-sangat tidak mudah dan sangat sulit. Namun, dengan tekad kami, *insya Allah*, tahun ini semoga kita bisa dapatkan.

Ada sembilan hal yang menjadi penilaian WHO yaitu tentang *regulatory system* kita, *marketing authorization*, kemudian *vigilance*-nya, kemudian *market surveillance*-nya, kemudian *licensing establish*-nya, *regulatory inspector*-nya, kemudian *lab testing*-nya, *clinical trial oversight*, dan *lot release* yang akan kita kembangkan. Jika ini kita bisa dapatkan, saya kira, saya ini merupakan hasil yang patut kita syukuri, karena ini menyangkut reputasi internasional dari lembaga yang terhormat tersebut.

Pada *slide* berikutnya, kami juga ingin melaporkan tentang implementasi standar *pharmaceutical inspector*. Kalau kita lihat tadi WLA ada sembilan *asesment*, kalau implementasi untuk Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme ini juga sangat penting, karena ini juga menunjukkan bagaimana kita, *inspector*, untuk *inspection* untuk melakukan penilaian terhadap obat, termasuk obat tradisional, tentunya, itu akan berjalan dengan baik. Nah, dalam konteks inilah maka kita bersyukur bahwa kita telah ter-*asesment* untuk Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme ini pada tanggal 2—6 Desember 2024 dan kami Badan Pengawas Obat dan Makanan telah disetujui bahwa kita juga masih menjadi bagian yang terbesar dari Pharmaceutical Inspector Co-operation Scheme yang baik.

Slide berikutnya, pemanfaatan obat bahan alam.

Bapak/Ibu.

Kami perlu jelaskan bahwa tentu implementasi standar *pharmaceutical* tersebut telah berjalan, nah, sekarang pemanfaatan obat bahan alam. Latar belakangnya, kita ketahui, bahwa berdasarkan data dari Badan Riset Inovasi Nasional, lebih dari 30.000 spesies obat bahan alam yang ada di negeri kita tercinta ini. Tidak banyak negara yang memiliki sumber daya alam seperti ini dan saya kira Indonesia menjadi salah satu atau satu-satunya negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa itu. Dari 30.000 spesies yang kita miliki, lebih telah diekstrak menjadi 17.000 lebih berupa bahan obat asli Indonesia, yang kita sebut dengan jamu-jamuan biasanya dan baru yang naik menjadi 78 menjadi obat herbal terstandar dan menghasilkan fitofarmaka baru 21.

Nah, saya kira ini perlu ada strategi khusus untuk bagaimana meningkatkan dari sumber daya alam kita yang begitu bagus untuk menaikkan sehingga jangan hanya 21 yang mendapat fitofarmaka dan itu perlu ada riset dan *development*. Tentu, bagi kita, pemerintah, caranya tentu bisa memberikan lingkungan yang *environment* yang bagus sehingga para pelaku usaha bergairah untuk melakukan riset, *development*, dan pengembangan obat asli Indonesia ini menjadi obat terstandar. Saya yakin, kalau kita membantu di situ, potensi yang besar ini akan hal yang luar biasa bagi negeri kita.

Saya kira, itu yang kami sampaikan, Ketua dan Wakil Ketua Anggota Komisi IX yang kami hormati.

Sebagai penutup, ada tiga hal yang menjadi kesimpulannya, yaitu Badan POM melakukan penguatan pengawasan obat dan makanan secara berkelanjutan, baik aspek hukum melalui penguatan regulasi layanan kepada pelaku usaha melalui intensifikasi, asistensi, intensifikasi pengawasan pemberdayaan, penguatan infrastruktur, dan penguatan pengujian sebagai tulang punggung pengawasan.

Yang kedua, Badan POM terus memperkuat regulasi dan pengawasan informasi publik sehingga memperoleh berbagai capaian keterbukaan informasi publik. Kemudian, yang ketiga, Badan POM terus membangun kolaborasi hingga ke *level* internasional untuk menjamin kualitas dan keamanan obat bagi masyarakat, serta meningkatkan pemanfaatan obat dalam negeri untuk kemandirian suplai bahan baku nasional.

Berbagai saran, masukan dan dukungan kami terus butuhkan dan harapkan dari para Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang terhormat. Kami sangat harapkan agar tugas pengawasan obat dan makanan yang dilakukan bisa lebih optimal. Terima kasih.

*Billahi taufik wal hidayah,
WAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam.

Terima kasih atas paparannya.

Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Anggota untuk mendalami materi yang disampaikan. Di meja kami sudah ada beberapa yang ingin bertanya. Yang pertama Pak Asep Romy Romaya, selanjutnya drh. Achmad Ru'yat. Kami persilakan, Mas Asep.

F-PKB (H. ASEP ROMY ROMAYA, S.E.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati dan saya banggakan, Pimpinan dan Wakil Pimpinan.
Teman-teman Komisi IX yang saya hormati dan banggakan.
Yang saya hormati, Badan BPOM beserta jajaran.**

Tadi Kepala Badan telah menyampaikan terkait ada salah satu temuan-temuan regulasinya terkait dengan tim halal mungkin sudah komunikasi. Setelah bisa jadi izin perusahaan dan izin edar, tapi masih ada juga temuan-temuan penyalahgunaan seperti itu. Ya, seperti kemarin yang terjadi mengandung babi atau yang lainnya, itu pengawasannya seperti apa?

Terus, ketika itu ada temuan salah satu perusahaan, terus karyawannya banyak, makanya kan kita di Komisi IX memikirkan masalah ketenagakerjaan. Ketika karyawannya banyak terus perusahaan ini ada masalah, langkah apa Badan POM beserta jajaran supaya itu jadi selamat? Berarti harus ada penuntunan aturan kembali atau bagaimana. Jangan sampai melanggar apa yang

bisa sampai jadi izin desain produk atau izin edar itu terus tidak berdampak juga terhadap karyawan. Itu harus selalu dipikirkan. Apakah kesalahannya itu kecil atau berarti bisa diperbaiki masalah campuran atau penyalahgunaannya itu.

Mungkin saya di Komisi IX, teman-teman juga, harapannya bisa kunjungan ke tiap-tiap perusahaan, apalagi yang bermasalah. Jadi, kita juga tahu di lapangan harus seperti apa. Mungkin dari saya cukupkan sekian.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
WAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Pak Asep. Selanjutnya, kami persilakan Pak drh. Achmad Ru'yat.

F-PKS (drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si):

Baik. Terima kasih.

**Kepada yang terhormat Ibu Felly, Ketua Komisi IX DPR RI,
Para Pimpinan beserta Anggota,
Yang terhormat, Pak Taruna, Kepala Badan BPOM beserta jajaran.**

Saya sangat menyambut baik MoU BPOM dengan Badan Gizi Nasional pada tanggal 23 Januari 2025 dan di dalam laporan ini dijelaskan bahwa RDP dengan DPR tanggal 12 Februari, DPR menyetujui untuk, katakanlah, adanya alokasi anggaran dalam pengawasan program BGN oleh BPOM. Namun, di lapangan, saya dari Dapil Bogor, Pak, Jabar V Kabupaten Bogor. Kemarin itu di Kota Bogor di sekolah yang menurut saya itu sangat representatif, ya, ada SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang keracunan, Pak. Jadi, hasil pemeriksaan, hasil yang keracunan itu ada 223 siswa-siswi, ya. Ternyata itu ada bakteri *Eschericia coli* dan *Salmonela* yang menyebabkan diare, mual, muntah. Ya, ini sangat membahayakan, Pak. Jadi, sampai sejauh mana, nih, MoU yang sudah dilaksanakan dengan peran BPOM atas peristiwa, katakanlah, yang baru beberapa hari yang lalu, ya, terjadi keracunan Makan Bergizi Gratis di sekolah Bina Insani, ya, SPPG Bosowa Kota Bogor?

Kemudian, yang kedua, kemarin kami Komisi IX melakukan RDP dengan Pak Menkes. Pak Menkes menjelaskan akan melakukan *clinical trial*, ya. Jadi, uji klinis terhadap vaksin TBC. Jadi, kami ingatkan, bahwa filosofi saat ini di negara ini kan untuk melindungi masyarakat. Jadi, sampai sejauh mana BPOM melakukan pengawasan? Karena ini penggunaan vaksin atas bakteri mikroba bakteri tuberkulosis, ini tingkat keamanan sampai sejauh mana, Pak?

Jadi, jangan sampai menimbulkan, katakanlah, dampak yang tidak kita inginkan pada masyarakat yang menjadi sampel atas uji klinis vaksin mikroba bakteri tuberkulosis, ya, karena dalam presentasi pekan sebelumnya, dari Kemenkes menjelaskan bahwa ditargetkan 2028 itu vaksin TBC ini bisa selesai dan 2029 bisa diimplementasikan, karena dampak paparan TBC ini di Indonesia lebih dari 1 juta, Pak, yang terpapar dalam 1 tahun. Yang meninggal akibat infeksi TBC ini lebih dari 100.000 dan 1 jam di tahun 2023 itu, setiap 1 jam itu 7 orang meninggal. Jadi, ini memang sangat strategis, ya.

Di satu sisi, kalau kita kemarin ada pandemi Covid-19 kok dibikin cepat, ya, produksi vaksin Covid-19, sementara vaksin TBC ini sudah berapa ribu tahun, ya, belum selesai. Sampai sejauh mana pengawasannya, Pak? Jadi, khawatir apa yang dipresentasikan kemarin Pak Menkes ini menimbulkan kerugian pada masyarakat. Jadi, pada prinsipnya memang vaksin ini penting. Kira-kira sampai sejauh mana ini pengawasan dari BPOM?

Kemudian, yang ketiga, mengenai bahan baku obat, Pak. Jadi, saya ingin dapat penjelasan *roadmap* dari BPOM atas penggunaan bahan baku obat yang sampai saat ini impor di atas 90%, ya. Jadi, ini strategi mungkin perlu kerja sama dengan kementerian. Sejauh mana dengan Kementerian Perdagangan, agar bahan baku obat ini tidak terus-menerus didominasi impor, Pak. Saya pernah bekerja di perusahaan obat, ketika terjadi reformasi, dolar meroket, wah, ini perusahaan-perusahaan pada lumayan, Pak, kena PHK dan seterusnya. Nah, seperti itu.

Kemudian, yang keempat, terkait dengan lebih dari 88.000, katakanlah, bisnis daring, ya, secara *online*, itu produksi, katakanlah, ilegal. Jadi, perizinan, kemudian juga sampai sejauh mana perusahaan-perusahaan ini memiliki, katakanlah, jaminan bahwa dia tersertifikasi, misalkan, aman. Jadi, tadi dipresentasikan menggunakan, katakanlah, siber, tapi yang saya lihat dalam triwulan pertama ini baru 19% penyidikan bisa dilakukan. Baru 36 kasus yang bisa ditangani dari 286 kasus. Kenapa, nih, Pak? Masalahnya di mana penyidikan ini kok hanya 19%? Sampai sejauh mana kerja sama dengan Kominfo terkait dengan beredarnya, katakanlah, bisnis secara *online*, ya, tautan *online* yang jumlahnya sangat besar. Saya lihat 88.000 lebih tautan yang memasarkan produk ilegal.

Demikian. Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan Pak Dr. Ir. Heru Tjahjono.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pimpinan Komisi IX, Teman-teman Komisi IX, Kepala Badan beserta jajaran.

Yang pertama, saya mengapresiasi Bapak. Jadi, di daerah jajaran Bapak sudah melakukan pelayanan sebaik-baiknya. Cuma, kayaknya tenaganya kurang. Tenaga yang masuk ke daerah-daerah kerja kurang, karena di situ banyak produk-produk lokal yang sebetulnya itu sangat perlu diantisipasi. Namun, demikian memang harus kerja sama dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah ikut bertanggung jawab terhadap produk-produk lokal. Ini sebetulnya BBPOM sudah jalan. Jalan, karena mungkin tenaganya ini. Namun demikian, perizinan sudah berlaku, semuanya sudah bagus. Tinggal yang produk-produk lokal yang perlu diantisipasi, banyak, seperti yang jamu dan lain sebagainya.

Yang kedua, ketimpangan kapasitas ini, perbatasan geografis di perbatasan-perbatasan. Perbatasan-perbatasan ini banyak, baik kosmetik, obat, apa pun yang masuk melalui perbatasan. Tentunya Bapak harus melakukan intervensi terhadap pengawasan di perbatasan. Itu yang tentunya yang banyak sekali mulai dari kosmetik dan sebagainya. Ini perlu bekerja keras, bekerja sama dengan aparat terkait, dengan lembaga terkait.

Yang ketiga adalah yang *online* tadi disebutkan, memang ini harus kerja sama lebih dalam dengan Menkominfo, Komidgi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang paling perlu ditindaklanjuti adalah tentang peredaran obat yang di perbatasan. Jadi, bukan hanya di Madura. Itu banyak ada di Madura dan itu kan banyak yang perlu dilihat obat-obat pulau-pulau, ya, pulau-pulau yang perlu dan itu sangat beredar banyak.

Kami terima kasih, Pak Kepala Badan. Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Artinya, jamu itu. Ya, di situ beredarnya macam-macam jamu.

WAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Waalaiikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan Ibu Dr. Hj. Netty Prasetiyani, kami persilakan. Siap-siap, Pak Obet Rumburen.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan, atas kesempatan yang diberikan.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati dan saya cintai, Pimpinan.

Hampir lengkap ini empat pimpinan hadir, luar biasa. Pak Kepala Badan harus melihat, ya, komitmen Komisi IX sampai empat-empatnya hadir. Jarang, Pak, seperti itu dan tentu saja,

Anggota Komisi IX DPR yang saya cinta saya banggakan, Kepala Badan POM Republik Indonesia, Pak Sestama, dan juga seluruh jajaran Badan POM, yang mohon maaf, saya tidak sebutkan satu per satu, ya.

Tentu, jika kita melihat catatan-catatan rapat kita sebelumnya, Pak, hampir kita ini selalu mengulang. Mengulang komitmen maksudnya, mengulang komitmen Komisi IX dalam rangka melindungi masyarakat dari berbagai potensi yang tadi Bapak jelaskan, mulai dari keracunan obat dan makanan, bahan obat alam, kemudian juga iklan promosi yang berlebihan, yang hari tidak dapat dibendung dengan kemudahan teknologi, ya. Nah, oleh karena itu, saya melihat dari otoritas yang Bapak miliki sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam pengawasan obat dan makanan, saya melihat ini tampaknya harus terus dikejar, Pak, karena kalau kita hitung secara kasar, begitu, ya, tampaknya triwulan pertama dari tahun 2025 ini, dalam berbagai aspek, ini masih tertinggal dari triwulan pertama pada tahun 2024. Jadi, kalau kita perhatikan, nih, Bapak harus kerja keras kalau kemudian triwulan pertama untuk sarana produksi yang diperiksa masih 456 jika dibandingkan dengan 2024 dan itu sama, Pak, ya.

Jadi, kalau kita lihat, ini Bapak harus bekerja keras semuanya di antara empat ini, maka yang paling harus kita kerja keras adalah bagaimana obat-obat alam, bahan alam, kosmetik, termasuk juga makanan, dan ini ternyata berbanding lurus, Pak, dengan kinerja pengawasan obat dan makanan. Kalau Bapak tadi sebutkan penyidikan obat dan makanan triwulan pertama 2025, realisasi perkaranya ini, kalau di 2024, ini mencapai 23% pada rentang waktu yang sama, sementara pada tahun 2025 baru 19%, Pak, seperti itu.

Padahal, kita menyadari sepenuhnya hari ini semua orang menjadi produsen. Kalau dulu orang jadi produsen makanan produsen obat itu tampaknya lebih sulit. Sekarang, jadi produsen, jadi *marketer*-nya, Pak, begitu. Kita lihat di berbagai kanal media sosial itu orang berjualan setiap hari, setiap saat, dan yang

kemudian menjadi marketnya, Bapak bisa bayangkan, masyarakat kita yang literasinya sangat rendah, seperti itu.

Jadi, kalau kita bicara soal indeks pembangunan yang di-*breakdown* dalam komposisinya, salah satunya adalah pendidikan, itu yang membuat masyarakat kita terjebak pada *skincare* ilegal, pada obat ilegal, dan seterusnya, begitu. Jadi, kalau kita lihat di sini, kinerja pengawasan obat dan makanan dalam konteks patroli siber ini, menurut saya, ini juga masih sangat rendah, Pak, seperti itu, ya.

Saya kok satu sisi melihat bahwa Badan POM memiliki komitmen yang besar, tapi tolong dijelaskan kira-kira hambatannya apa nih, kenapa? Karena periode lalu kita juga sering menanyakan kepada Badan POM, seperti apa peta jalan *road map* untuk terus memperkuat dari aspek kelembagaan di daerah begitu, ya. Saya enggak usah jauh-jauh, lah, di Cirebon, di dapil saya itu, Pak, itu yang namanya produk makanan minuman itu luar biasa ya.

Kalau kemudian kita bicara tentang di mana orang bisa mendapatkan pendampingan, pengawasan langsung, itu di Jawa Barat ada Balai Besar, kemudian ada Loka POM begitu, ya, di Tasik dan Bogor, begitu. Padahal dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia, hampir 50 juta di Jawa Barat, ya, seharusnya sangat rasional, Pak, kalau kemudian dalam konteks kelembagaan itu, ya, masyarakat mendapat kemudahan untuk bisa mendapatkan pembinaan, mendapatkan pendampingan, termasuk juga kerja-kerja pengawasan, seperti itu. Itu yang pertama, ya.

Nah, yang kedua, hari ini saya juga ingin bertanya. Kalau kemudian kita bicara tentang tadi. Yang kedua itu tentang bagaimana upaya kita untuk melakukan pengawasan terhadap promo dan iklan di media sosial, Pak, dan juga peran *influencer*. Saya ingin bertanya kepada Badan POM, sejauh mana upaya kita untuk melakukan pembinaan para *influencer* yang hari ini luar biasa? Nah, jadi kerja-kerja administratif yang Bapak lakukan dan kemudian Bapak sampaikan lima kali informatif berturut-turut, Pak, ini belum dialogis, Pak, seperti itu. Data pengawasan juga belum *real time* didapatkan oleh masyarakat. Bahkan kemudian masyarakat juga untuk mendapatkan, oh, ini produk ini berbahaya, oh, produk ini mengandung A, B, C, dan D, itu agak sulit didapatkan. Nah, menurut saya, ini yang juga harus diperbaiki agar kalau kita bicara tentang keterbukaan informasi, maka tantangan digital dan *e-commerce* ini nantinya akan bisa diatasi, ya. Nah, itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, saya juga ingin menanyakan, nih, kepada Bapak, seperti apa koordinasi lintas sektoral yang sudah dilakukan? Karena saya yakin Badan POM ini bagian kecil dari upaya yang sangat besar harus kita lakukan untuk menghadirkan sebuah mutu obat dan makanan yang memang aman, ya. Ada Kemenperin, ada Kemendag, begitu ya, ada kementerian dan lembaga yang lainnya. Nah, seperti apa koordinasi lintas sektor yang sudah dilakukan?

Berikutnya, Pak, tadi Bapak juga sudah menjelaskan, sebetulnya, tentang makan bergizi gratis yang hari ini sudah mengundang Badan POM, dan bahkan dalam kesimpulan rapat beberapa waktu yang lalu bersama Badan Gizi Nasional kita juga sudah memasukkan, ya, dalam kesimpulan rapat bahwa hendaknya melibatkan Badan POM, kenapa? Karena kalau dari berapa, 17 kasus, ya, 17 kasus yang terjadi ini, kira-kira apa yang kemudian harus dilakukan, Pak, perbaikannya? Apakah rantai pasoknya? Apakah kemudian SDM-nya? Apakah kemudian SPPI-nya? Yang mana, Pak? Seperti itu.

Jadi, mumpung kita ketemu dalam rapat ini, kita juga perlu mendapatkan penjelasan dari Bapak agar program yang menjadi salah satu Asta Cita Presiden ini betul-betul berjalan dengan baik dan targetnya ini bisa tercapai, Pak, kenapa? Karena kalau kita lihat, tadi Bapak mengelompokkan ada siswa, ada santri, ada ibu hamil, kemudian ada balita, ya. Pastinya ini juga harus bisa memperhitungkan seperti apa paket atau menu yang bisa diterima oleh berbagai segmen ini. Ini menjadi salah satu aspek akuntabilitas dari keberadaan Badan POM yang sudah membangun MoU dengan BGN, seperti itu.

Yang juga tidak kalah penting, Pak, saya juga ingin menanyakan ini sebetulnya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya, Pak Ru'yat, tadi tentang rencana pemerintah untuk melakukan kerja sama dalam pengadaan vaksin TBC, ya, M72 yang hari ini dibawa oleh Bill & Melinda Gates Foundation, seperti itu. Berkaca pada pandemi Covid-19, menurut saya, ya Badan POM harus proaktif, agar apa? Agar apa yang kemudian menjadi perbincangan di kanal media sosial, di tengah masyarakat, ini kemudian bisa ditengahi dengan informasi yang *evidence based*. Bisa diredam dengan informasi yang memang berbasis ilmiah, seperti itu sehingga tidak lagi ada kuadran masyarakat yang masuk dalam kategori kebingungan dan kemudian menyebarkan disinformasi, misinformasi, bahkan *hoax*, begitu, tentang apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ini yang kemudian juga harus dilakukan.

Terakhir, Pak, saya ingin mengonfirmasi saja. Kalau tadi, kan Bapak menyebutkan es krim mengandung babi dan seterusnya, kok bisa, ya, itu sampai masuk ke swalayan, misalnya, begitu, ya. Nah, ini kan yang tadi pertanyaannya ada kaitannya pertanyaan saya sebelumnya. Seperti apa koordinasi lintas sektoral yang sudah dilakukan? Jangan sampai kita sudah merasa melakukan sesuatu padahal tidak tersambung dengan kementerian lembaga yang lainnya, begitu, ya.

Saya tetap mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Badan POM, meskipun sering kali muncul sebuah diksi keterbatasan, tapi tetap bersemangat untuk mengawal aspek keamanan dan mutu obat dan makanan di tanah air. Ya, itu saja dulu mungkin, Pimpinan, yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan Pak Obet, setelah itu Pak Surya Utama.

F-PDI PERJUANGAN (OBET RUMBRUREN):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan yang saya hormati,
Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Kepala Badan POM dan jajaran yang saya hormati.**

Di Papua Barat, khususnya dalam pengawasan Program Makanan Bergizi, sampai dengan saat ini belum ada permasalahan. Saya selaku Anggota DPR yang mewakili Dapil Papua Barat memberikan apresiasi yang tinggi pada Badan POM Papua Barat.

Namun, kita ketahui bahwa banyak penolakan-penolakan yang dilakukan di Provinsi Papua pada umumnya, baik Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat. Nah, ini tentu, ya, saya harapkan kerja sama antara Badan Gizi Nasional dan Badan POM. Ya, bagaimana pendekatan-pendekatan dilakukan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh perempuan untuk menjelaskan sehingga mereka juga dapat memahami dan bisa dapat menjelaskan itu kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan daripada program pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun presiden ini dapat berjalan dengan baik.

Nah, karena sampai hari ini, contoh di Manokwari itu ada yang melaksanakan dapur tidak bisa tulis, ya, tidak bisa memberi itu, karena ketakutan jangan sampai demo. Itu di depan Universitas Negeri Papua. Saya bilang tidak usah pasang spanduk apa di situ, cukup kita tahu bahwa di situ ada dapur satu di situ.

Nah, itu yang saya sangat harapkan dan mohon kepada Badan POM untuk bisa menyampaikan ini kepada Badan Gizi Nasional untuk, ya, dapat melaksanakan ini yaitu pendekatan dengan tokoh-tokoh yang tadi saya bilang.

Demikian. Terima kasih, Pimpinan.

Shalom.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Shalom.

Terima kasih untuk Pak Obet. Selanjutnya kami persilakan Pak Surya Utama. Setelah Pak Surya, Pak Dr. Edy Wuryanto.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Ya, terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi juga untuk Teman-teman Anggota Komisi IX dan juga Kepala BPOM dan seluruh jajarannya.

Jadi begini, Pak, saya 2 minggu lalu dikejutkan dengan video yang viral bukan hanya di Indonesia, tapi *viral*-nya sampai internasional, Pak. Itu video yang dibuat video *documentary* dari seorang yang bernama Andrew Fraser, kalau enggak salah itu judulnya adalah *Indonesia's Toxic Tofu Timebomb: Poisoning Million Daily*. Di situ di film, di video *documentary* dia melakukan penelitian dan pembuatan dokumenter, bahwa ternyata di Jawa Timur sekitar Surabaya itu ada sentral pabrik pembuatan tahu yang bahan bakarnya menggunakan sampah plastik.

Nah, itu terbayang bagaimana berbahayanya bukan hanya paparan-paparan dari sisa-sisa residu plastik yang masuk ke tahu-tahu itu, tapi juga udara-udara asap-asapnya juga yang mungkin itu, bukan mungkin sudah pasti meracuni pekerja-pekerjanya, dan juga penduduk-penduduk sekitar. Ini bukan suatu hal yang baru dan itu sentral pembuatan tahu itu tersentral, dan itu yang beli itu setiap hari sudah pasti banyak sekali, ribuan bahkan mungkin lebih dari itu.

Ironisnya, sebetulnya 5 tahun yang lalu, saya juga sudah melihat ada video dokumenter juga dibuat oleh ABC News Australia yang meneliti soal ini juga. Di Indonesia, lagi-lagi di Indonesia, itu sampai sampah-sampah plastik itu diekspor, *sorry*, diimpor dari luar. Diimpor dari luar dari negara luar untuk ke Indonesia, untuk dijadikan bahan bakar pembuatan tahu tersebut.

Nah, bagaimana ini di sini BPOM, apa yang akan dilakukan BPOM untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang lain atau mungkin pemerintah daerah setempat? Karena saya takutnya bukan hanya di Jawa Timur saja, takutnya ada tempat-tempat lain yang juga menggunakan bahan bakar plastik ini sebagai bahan bakar pembuatan makanan, karena memang pasti biayanya murah. Cuma kan terbayangnya itu toksiknya, racunnya tuh luar biasa pasti.

Nah, ini video yang kemarin itu, yang dua minggu lalu, sudah ditonton lebih dari 2,6 juta penduduk, *viewers* di seluruh dunia. Jadi, saya minta BPOM serius

untuk soal ini, karena ini ternyata saya yakin bukan cuma baru tahun ini saja, tapi sudah bertahun-tahun dan tahu kan adalah makanan kesukaan kita dan makanan umum yang dikonsumsi oleh banyak masyarakat Indonesia. Saya meminta BPOM harus serius untuk masalah ini.

Terima kasih.

WAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Waalaikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan Pak Edy Wuryanto, setelah itu Pak Nurhadi. Kalau Pak Nurhadi belum masuk lagi, mungkin langsung ke, sudah? Oh, ya, baik.

Pak Edy Wuryanto kami persilakan

F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep.):

Terima kasih, Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya.*

**Ketua, Anggota, yang saya hormati,
Pak Kepala Badan POM dan seluruh jajaran yang saya hormati.**

Saya apresiasi dari seluruh pemaparan, Pak, tapi saya hanya akan fokus pada satu isu yang terkait dengan BGN dan MBG, ya. Ya, apa pun yang terjadi, kita harus prihatin dengan 17 kasus KLB di sepuluh provinsi. Ini bentuk bahwa kita masih belum optimal di dalam konteks keamanan pangan.

Bapak tadi sudah menyampaikan berbagai hal tentang kerja sama antara BPOM dan BGN, tapi saya melihat, Pak, kerja sama yang dilakukan belum optimal. Padahal PP Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Pasal 47, pangan olahan siap saji itu menjadi urusan nomor satu Menkes, kedua Kepala Badan, yang ketiga bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangannya.

Kalau saya uraikan, Pak, Menkes untuk mengawasi pangan olahan siap saji infrastrukturnya enggak sampai daerah, Pak. Yang kedua, kalau bupati/wali kota, dalam konsep BGN MBG, dia tidak melakukan dekonsentrasi, Pak. Maka yang paling tepat sesungguhnya dalam pangan olahan siap saji itu Kepala BGN,

sorry, Kepala BPOM. Jadi, BPOM ini menurut saya partner dengan BGN terkait dengan pangan olahan siap saji. Jadi, ini melibatkan dua kepala badan. Ini kalau digabungkan, Pak, dimerger dalam mengawasi MBG, Pak, ini menurut saya paling efektif dan Bapak punya otoritas PP Nomor 86 Tahun 2019.

Yang kedua, Pak, di Pasal 51 ayat (3) Badan POM juga punya otoritas untuk melakukan pemeriksaan dengan memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan. Artinya, Pak, Bapak punya otoritas yang kuat sebetulnya untuk melakukan pengawasan pada seluruh SPPG yang dibangun oleh BGN.

Nah, pertanyaan, Pak. Satu, BPOM diberi kewenangan ketika BGN memberi izin pada SPPG yang diusulkan, BPOM dilibatkan dalam proses ini enggak, Pak? Kan mestinya Bapak harus melakukan cek dulu seluruh persyaratan yang diajukan oleh, apakah itu mitra yayasan atau yang lain dalam semua standar yang ditetapkan oleh BGN, apakah itu menyangkut gedungnya, lantainya, dapurnya, alat makannya, penyimpanan makanannya yang basah dan kering. Bapak diberi otoritas, enggak, sebelum BGN memberi izin, Pak? Kalau tidak, Pak, Bapak tidak akan melakukan, tidak akan mungkin bisa melakukan pengawasan, dan pasti kalau sarannya ini tidak memenuhi standar, wajar, dong kalau kemudian terjadi keracunan. Saya tidak yakin BGN punya kemampuan untuk itu, yang punya kemampuan hanya BPOM, Pak. Instrumen yang dimiliki baik SDM, infrastruktur, *resources* apa pun, yang punya itu BPOM, Pak.

Jadi, dari seluruh tahapan proses yang Bapak sampaikan itu, kalau Bapak tidak mengendalikan pemberian izin, ini salah besar negara ini. *Wong* UMKM saja Bapak kontrol ketat, kok. Masyarakat kecil itu yang UMKM Bapak kontrol ketat, kasih izinnya susah bukan main, kok. Kenapa ini menyangkut 3.000 orang setiap hari yang memberikan makanan siap saji, Bapak lepas begitu saja? Apakah karena ketakutan sesama lembaga negara? Kan enggak mungkin begitu. Ini penting, Pak. Ini Bapak punya kewenangan, tetapi kalau Bapak enggak gunakan kewenangan ini, yang korban anak-anak, Pak. Kan tidak logis juga ketika terjadi KLB, solusinya asuransi apa kemarin itu. Enggak logis, begitu lho. Kalau ada KLB, mestinya diperkuat, dong, *quality*-nya. Ini saya dorong Bapak untuk berani ngambil langkah itu.

Yang kedua, Bapak diberi kewenangan untuk menutup, tidak? Diberi kewenangan untuk menutup enggak? Kalau enggak, ada keracunan, siapa yang menutup? Menutup itu dasarnya adalah sarana ini enggak memenuhi syarat untuk menyediakan pangan olahan siap saji. Yang kita selamatkan rakyat, Pak. Enggak boleh, lho. Dalam *patient safety*, *client safety*, ini nomor satu, Pak. Apa pun yang dilakukan, tetap sandaran kita adalah *client safety*.

Nah, ini dua pertanyaan ini mestinya menjadi senjata BPOM untuk mengendalikan seluruh SPPG yang dibangun oleh negara ini agar ada keselamatan anak-anak kita. Jangan sampai kita memburu jumlah kualitas, tapi makin hari korbannya makin banyak. Nanti media terus akan mengungkit itu dan nanti enggak enak Pak Presiden, Pak. Ini program unggulan nasional. Selalu kemudian tidak memperoleh kepercayaan publik, kan nanti enggak bagus, Pak, padahal program ini sangat bagus.

Jadi, saya mendorong dua hal itu untuk BPOM berani ambil langkah strategis, karena di dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, BPOM punya kewenangan dalam MBG. Dua aturan itu sebetulnya Bapak kuat, tapi kalau Bapak enggak mau gunakan ini, ya sudah, artinya ada kawan BPOM lemah di situ.

Maka tadi kan Bapak juga menemukan misalnya CPPOB belum standar, tapi apa yang dilakukan, ini belum ada. Oleh karena itu, saya mendorong betul, kalau misalnya Bapak mengeluhkan anggaran, kan pasti butuh tambahan anggaran Bapak, karena 30.000 dapur dengan *resource* yang Bapak miliki, kalau menggunakan anggaran standar Badan POM, enggak cukup pasti. Nah, itu dinego, dong. Kalau perlu, di rapat berikutnya boleh, dong, disampaikan kepada Komisi IX sehingga pada saat evaluasi MBG terintegrasi dengan BGN, kita bisa mengambil solusi, karena dua-duanya mitra Komisi IX, biar kami bisa menjawab kepada publik terhadap persoalan ini.

Saya kira itu, Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan Pak Nurhadi, S.Pd., M.H. Setelah itu siap-siap, Bapak Ir. Sahidin. Kami persilakan.

F-P. NASDEM (NURHADI):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Izin, saya perpanjang dulu, Pak Nurhadi. Bapak/Ibu, sekarang ini sudah pukul 12.05 sampai 12.30 dulu, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, lanjut, Pak Nurhadi.

F-P. NASDEM (NURHADI):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX,
Yang saya hormati Kepala BPOM beserta seluruh jajaran, sehat selalu semuanya.**

Yang pertama, terkait tindak lanjut dari kasus beberapa waktu yang lalu, yang cukup menyita perhatian publik, yaitu kaitannya dengan intervensi *influencer* yang menurut kami melakukan *offside*, ya, Pak. Soal peran *influencer* dalam edukasi publik. Pertanyaan saya, apakah BPOM sudah menyusun regulasi baru terkait peran *influencer* dalam komunikasi publik ini? Dan bagaimana bentuk pengawasan terhadap klaim produk yang disampaikan oleh *influencer*? Dan adakah sanksi konkret bagi yang melanggar? Pertama itu.

Yang kedua, saya menyoroti kaitannya lemahnya sistem pengawalan pengawasan *online* dan sosial media oleh BPOM, apakah itu di TikTok, di Instagram, bahkan di *e-commerce*. Ini masih banyak kita temui. Misal kalau kita mau beli pil kurus, pil pelangsing, pil atau penambah stamina pria, ini banyak yang belum atau tanpa izin edar. Coba, kalau Bapak/Ibu tidak percaya, cukup *Googling* begitu, ya, obat kuat atau mungkin *glow up* instan, pasti akan langsung muncul. Padahal Bapak juga sering menyampaikan bahwa BPOM sudah melakukan kerja sama dengan Kementerian Kominfodigi, tapi kenyataannya yang kami amati iklan dan distribusi produk-produk yang ilegal tanpa izin BPOM ini masih merajalela, Pak. Jadi, pertanyaan saya, pengawasannya hanya reaktif setelah *viral* saja? Ataukah ini sudah berbasis deteksi dini atau mungkin program-program yang berbasis AI yang pernah Bapak sampaikan?

Yang ketiga, nah, ini sesuai dengan Asta Cita Bapak Prabowo yang mengangkat produk-produk bahan baku lokal kaitannya dengan obat alam, Pak. Soal integrasi obat bahan alam dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langsung saja pertanyaannya, apa kendala utama dalam integrasi obat bahan alam khususnya yang sudah pada level fitofarmaka ke dalam formularium yang sampai saat ini belum bisa masuk, Pak? Padahal bahan baku di Indonesia sangat melimpah. Kita ada 3.000 lebih jenis tanaman yang ditengarai berkhasiat untuk kesehatan manusia. Nah, apakah BPOM sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan atau BPJS Kesehatan untuk mendukung kebijakan afirmatif kaitannya obat bahan alam bisa masuk dalam program JKN?

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Baik. Terima kasih, Pak Nurhadi.

Saya menggantikan Ibu Ketua sementara. Kita lanjut ke Pak Sahidin. Ya, silakan, Pak, dan *standby*, Ibu Rani. Pak Sahidin silakan.

F-PAN (Ir. H. SAHIDIN):

Baik. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan beserta Anggota Komisi IX yang kami hormati,
juga kepada Bapak Kepala BPOM beserta Jajaran.**

Ada beberapa hal mungkin, Pak, yang perlu kita sampaikan, komunikasikan kepada Bapak, ya. Provinsi, kabupaten/kota setiap tahun ada pengadaan obat untuk daerah atau untuk puskesmas apa rumah sakitnya di daerah situ. Saya dulu pernah ditemukan, Pak, obat ini kedaluwarsanya tuh habis tahun, habis, Pak. Contohnya, pengadaan obat, katakanlah, tahun 2025 ini lelang tender selesai bulan 5, bulan 6. Terus obat dimasukkan oleh pemenang pengadaannya, tapi obat ini, ini enggak sampai setahun, Pak, sudah habis kedaluwarsanya. BPOM bagaimana pengawasannya, Pak? Ada enggak SOP-nya? Sehingga obat ini bukan habis setahun anggaran, habis kedaluwarsanya, bukan seperti itu. Ini seperti apa? Apakah obat ini perlu 2 tahun, 3 tahun, baru habis? Ini seperti apa SOP-nya atau pengawasannya seperti apa di daerah kabupaten ?

Yang kedua, hampir setiap waktu, setiap saat, hari ini kita temukan *home industry*, baik jamu, semua obat-obatan, baik madu-madu lebah ini, Pak, bermacam-macam dimodifikasi, di-*mix*, ya, untuk inilah untuk itulah khasiatnya. Nah, ini seperti apa instrumennya, Pak, pengawasan kita? Selain kita, kan balai kan tidak sampai ke kabupaten daerah kecamatan. Nah, ini seperti apa pengawasan kita, ya, obat-obat *home industry* ini *home industry* yang setiap saat setiap waktu bertambah terus, ya? Nah, ini ya mungkin dampaknya tidak ada, ya, tetapi kalau terus menerus diminum, dimakan, ada dampaknya. Nah, ini bagaimana BPOM instrumennya untuk pengawasannya? Banyak yang tidak punya izin apa semuanya?

Saya rasa itu saja, Pimpinan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Baik. Terima kasih, Pak Sahidin. Selanjutnya Ibu Ranny dan *standby*, Bu Neng Eem. Silakan.

F-P. GOLKAR (RANNY FAHD ARAFIQ):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada yang terhormat, Pimpinan Komisi IX, Anggota Komisi IX, serta Kepala Badan POM beserta jajarannya.

Saya, pertama-tama, *appreciate* untuk Badan POM yang sudah banyak melakukan perbaikan, walaupun masalahnya banyak yang masih harus dihadapi. Terutama dalam pengawasan produk yang beredar secara daring, yakni masuknya produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik ilegal dari luar negeri. Ini diperlukannya peningkatan kerja sama lintas sektor, penguatan regulasi, dan peningkatan kapasitas laboratorium juga. Itu menjadi kunci dalam menghadapi persoalan di atas. Yang ingin saya tanyakan dari penjabaran saya di atas adalah, satu, apa saja proses hukum atau sanksi yang sudah ditempuh BPOM terhadap produsen pangan olahan yang terbukti menyembunyikan kandungan babi dalam produknya? Serta bagaimana sinkronisasi teknis antara BPOM, MUI, dan Kementerian Agama dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran label halal produk pangan olahan?

Yang kedua, bagaimana upaya BPOM dalam memperketat pengawasan terhadap peredaran obat ilegal dan kosmetik di pasar *online*? Sejauh mana efektivitasnya, maaf, sejauh mana efektivitas regulasinya secara teknis?

Mungkin itu saja. Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Bu Ranny. Selanjutnya Bu Neng Eem Marhamah, kami persilakan.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I.,M.M.):

Terima kasih.

**Bu Ketua Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati dan yang saya banggakan,
Kepala BPOM beserta jajaran yang saya hormati dan yang saya banggakan.**

Pertama, saya mengapresiasi atas semua paparan yang disampaikan, terutama terkait penandatanganan MoU BPOM dengan BGN, karena memang kejadian luar biasa itu sudah ada 17 kasus, ya, yang terjadi di 10 provinsi dan yang terakhir itu ada di dapil saya, di Cianjur, di SPPG yang ada di Cianjur. Kemudian yang paling terakhir di SPPG Kota Bogor, dan itu, wilayah itu daerah tersebut adalah dapil, daerah pemilihan saya. Oleh karena itu, saya sangat apresiasi.

Cuma, kami ingin menanyakan ini, kalau di sini kan memang setelah ada tambahan anggaran belanja, ya, tetapi kami ingin menanyakan untuk teknis-teknisnya. Apakah teknisnya itu kemudian ada dari BPOM yang *standby* di sana? Ataukah SDM-nya nanti dilatih seperti apa? Atau kemudian ada mungkin *monitoring*-nya setiap minggu? Atau memang sebelum makanan itu didistribusikan BBPOM hadir di sana? Nah, bentuk kehadirannya seperti apa? Apakah orang-orang yang ada di sana dilatih dan lain sebagainya atau seperti apa? Begitu.

Itu yang ingin kami tanyakan, karena kalau sekarang ini kan baru, misal, setelah ada kejadian, baru BPOM kemudian turun untuk membantu, kan? Apa sebenarnya berasal dari apa nih racunnya tersebut, seperti itu, apakah di proses, apakah di bahan baku, atau mungkin ada bakteri dan lain sebagainya. Baru seperti itu, begitu, kan. Nah, untuk ke depan, ini kami sangat apresiasi. Nah, itu makanya kami butuh tahapan tersebut seperti apa, begitu, kan. Apakah memang harus ada, misalkan, mungkin karyawan dari SPPG tersebut yang kemudian dilatih atau seperti apa, terus atau ada alat dan lain sebagainya.

Terus, yang kedua terkait ekosistem layanan pengawasan obat dan makanan terpadu. Itu juga kami apresiasi. Cuma, kami ingin menanyakan teknis yang paling mudah diakses oleh masyarakat untuk bagaimana masyarakat merasa aman mengonsumsi salah satu produk yang beredar di pasaran. Kalau hari ini kita kan cukup melihat label. Oh, sudah ada PIRT-nya, sudah ada halal, dan lain sebagainya, begitu, kan? Apakah dari aplikasi tersebut, misal, karena begini, kalau dari label itu kadang juga ada label, penipuan juga kan ada. Produk orang hari ini, misalkan, bikin produk yang palsu itu juga banyak juga seperti itu.

Nah, oleh karena itu, untuk *check and recheck*, untuk memastikan apakah ada aplikasi, misal, kita mau beli produk tertentu, kita cek di aplikasi tersebut, ini kita cek, apakah ini sudah benar-benar terdaftar di BPOM, apakah sudah benar-benar aman dan sebagainya. Kita cukup masukkan, misalkan nama produknya, terus keluar, oh aman, misal. Apakah seperti itu?

Nah, kalau seperti itu, berarti itu hanya produk-produk yang bermerek tertentu, kan? Nah, sedangkan yang itu, yang kedua, kami juga ingin menanyakan bagaimana dengan makanan-makanan yang banyak beredar di pasaran-pasaran tradisional. Nah, di pasaran tradisional itu kan rata-rata belum ada merek nih, ya, belum ada merek. Nah, seperti apa kemudian BPOM untuk memastikan bahwa bahan-bahan makanan yang ada di pasar tradisional itu aman? Apakah ada mungkin pemeriksaan setiap bulan, berkala, atau setiap minggu atau seperti apa? Karena kalau di pasar tradisional juga pasti kan yang jualan itu tetap orang tersebut, jualannya ini dan lain sebagainya. Jadi apakah setiap bulan kemudian ada, atau setiap mungkin berapa bulan sekali, atau bahkan mungkin setiap minggu dicek? Seperti itu. Nah sehingga setelah ada pengecekan itu, apa bisa diumumkan di aplikasi atau lamannya BPOM, bahwa di pasar, misalkan pasar tradisional Cipanas, Cianjur, produk-produk yang sudah diuji oleh BPOM ini, ini, ini letaknya di sini itu aman, misalkan. Seperti itu, Pak.

Jadi, kita ingin mendapatkan informasi-informasi seperti itu, untuk mengaksesnya, nih, masyarakat itu untuk mengetahui bahwa itu aman atau tidak, begitu kan dengan akses yang mudah itu seperti apa.

Mungkin itu saja. Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
WAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Walaikumsalam.

Selanjutnya, yang terakhir Bapak Dr. Ashabul Kahfi kami persilakan.

F-PAN (Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati, Bapak Kepala BPOM, Bapak Taruna.

Saya hanya satu poin saja, Pak, yang di halaman 5 ini. Yang pertama-tama, tentu saya sangat mengapresiasi, Pak, ya, capaian pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Itu di tahun 2024 itu kan capaiannya bahkan di atas 100%, baik untuk sarana maupun untuk distribusi, tetapi ini mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2025.

Contohnya, untuk triwulan pertama, untuk pengawasan di bidang sarana produksi dan distribusi ini masih di angka 12,1% untuk di triwulan pertama. Nah, untuk distribusi, baru 14,3%. Jadi, ini mengalami turunan yang sangat signifikan.

Nah, padahal kita tahu bahwa pengawasan sarana dan distribusi ini adalah lini terdepan di dalam menjamin kualitas obat dan makanan. Ini, bisa jadi, ada kaitannya dengan masih maraknya sampai hari tiba, mungkin diketoknya di situ, karena masih maraknya seperti disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu tadi, bahwa mulai dari produk makanan, obat-obatan, kosmetik yang ilegal, itu kan masih beredar begitu banyak di tengah-tengah masyarakat sehingga pengawasan ini menurut saya perlu menjadi perhatian khusus, Pak. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua menyangkut masalah penindakan. Penindakan juga ini saya lihat mengalami penurunan, Pak. Di tahun 2024 itu triwulan pertama saja itu sudah 64, untuk tahun 2025 triwulan pertama ini penindakannya baru 36. Nah, ini mungkin perlu menjadi perhatian, karena ini sekali lagi saya sampaikan bahwa pengawasan ini kunci utama, Pak, dalam menjamin seluruh produk yang aman dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Itu, Pak. Itu mungkin yang dua poin yang ingin saya tanyakan, pada kesempatan ini. Demikian.

WAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Waalaiikumsalam.

Selanjutnya di meja Pimpinan. Kami persilakan untuk Pak Charles Honoris.

F-PDI PERJUANGAN (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Ya, terima kasih, Bu Ketua.

**Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Bapak Kepala Badan POM beserta jajaran.**

Pak Kepala, pertama, saya ingin sama juga, ya, menggarisbawahi yang disampaikan Pak Surya tadi. Saya sudah menonton videonya, Pak, ngeri, Pak. Saya itu biasanya suka banget makan tahu, tapi setelah menonton video yang sama, nih, yang ditonton oleh Pak Surya tadi, yang disampaikan ke kita semua, saya hampir enggak makan tahu, nih, Pak, 2 minggu ini. Jadi, saya minta, Pak, Badan POM untuk bisa memeriksa tempat-tempat seperti ini, Pak, ya, karena tempat produksi tahu itu enggak hanya di Surabaya, di Jakarta juga ada, ya, namanya KOPTI itu Koperasi Produksi Tahu Tempe. Kalau lihat videonya, kok sekilas sepertinya mirip-mirip, ya, tempat produksi tahu itu di beberapa kota seperti itu.

Jadi, saya berharap Badan POM bisa mendatangi tempat-tempat tersebut, ya. Kalau ada pelanggaran, mungkin apa yang bisa dilakukan, ditindak sehingga

bahan pangan yang seperti ini tidak tersebar luas ke masyarakat. Kalau perlu, mungkin produsennya juga harus diberi pembinaan, Pak sehingga bisa memproduksi dengan cara produksi yang baik dan benar, lah, begitu.

Berikutnya terkait dengan MBG, Pak. Pada rapat yang lalu dengan Badan Gizi Nasional kita sudah pernah memasukkan dalam kesimpulan rapat bahwa BGN harus berkoordinasi dengan Badan POM untuk memastikan bahwa setiap mitra yang terlibat dalam Program MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat dengan mengutamakan pengawasan terhadap bahan makanan dan lain-lain, dan lain-lain. Pertanyaan saya, sejak 6 Mei 2025 yang lalu, apakah ini sudah dilakukan oleh BGN? Karena ini adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama-sama antara BGN dan kami di Komisi IX sehingga mereka harus melakukan itu, ya.

Yang kedua, saya melihat perencananya sudah bagus, nih, Pak, usulan kegiatan pengawalan MBG oleh Badan POM, ya. Dalam rapat yang lalu juga sudah kami sampaikan bahwa kami meminta agar Badan POM bisa terlibat secara aktif untuk mencegah terjadi keracunan yang sudah terjadi berkali-kali. Nah, bahkan dalam rapat yang lalu, seingat saya, kita sepakat semua di sini untuk nantinya mengundang dua badan ini untuk bersama-sama hadir di ruangan ini mencari titik temu agar ke depan kejadian keracunan tidak terulang kembali. Jadi, Ibu Ketua, saya meminta nanti dimasukkan dalam kesimpulan rapat bahwa kita akan mengundang Badan POM dan BGN untuk duduk di sini rapat bersama kami di Komisi IX khusus membahas Program MBG dan bagaimana kita bisa mencegah *excess-excess* negatif dari, seperti keracunan makan dan sebagainya.

Iya, jadi, Pak Kepala, ya itu tadi sih, sebetulnya saya ingin tahu dari BGN-nya sendiri sudah ada progres apa terkait apa yang kita sampaikan di sini, ya, karena kalau cuma sekedar MoU saja, ya enggak ada manfaatnya buat kita semua. Saya jujur kaget, ya, ketika kemarin diminta tanggapan oleh wartawan terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat MBG. Terus saya pikir-pikir, ini program apa, ya, butuh asuransi. Kok ini menjadi program yang menjadikan ada risiko terhadap nyawa manusia sepertinya. Asuransi itu dibutuhkan ketika orang berkendara di jalan, ya, naik motor, ada risiko ditabrak, meninggal dunia. Masa dia dapat makan gratis ada risiko yang harus diasuransikan, begitu, kan.

Jadi, ini sudah ini, lah, menurut saya sudah susah ngomong, saya sudah enggak tahu mau ngomong apa lagi, tapi ya ke depan saya berharap Badan POM harus berpartisipasi lebih aktif, ya. Bahkan saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Edy tadi. SPPG harus sebelumnya diperiksa oleh Badan POM, sebelum bisa diberikan izin untuk operasional, harus mendapatkan persetujuan dari Badan POM dulu, ya. Ini kita semua berharap yang terbaik, kok, agar programnya Bapak Presiden, Program MBG ini bisa berjalan dengan baik, begitu ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik. Terima kasih.

Yang bertanya ada 13 penanya, Pak Kepala Badan. Kemudian, selain dari capaian produksi pemeriksaan sarana menyorot untuk capaian di triwulan pertama dibandingkan dengan 2024 yang lalu, produksi, kemudian distribusi dan rata-rata capaian *sampling*, pengujian, juga realisasi perkara, dan banyak juga menyangkut pengawasan makanan, jajanan pasar, dan tidak kalah banyak sekali yang bertanya menyangkut kaitan dengan Badan Gizi.

Mungkin ini di-*cluster* saja, Pak, tidak usah jawab satu per satu di-*cluster* untuk dijawab per klaster. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kami persilakan waktu yang baik ini untuk Pak Kepala Badan merespons atau menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Silakan.

KEPALA BPOM RI (Prof. Dr. TARUNA IKRAR, M. Biomed., Ph.D.):

Terima kasih.

Ibu Ketua, Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati.

Kami akan menjawab per kluster, karena tentu kalau satu per satu ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

Yang pertama, kluster pertama berdasarkan yang paling banyak pertanyaan yang berhubungan dengan Makan Bergizi Gratis. Ada beberapa hal yang perlu kami jawab. Bahwa sesuai dengan MoU Badan POM dengan Badan Gizi Nasional itu kita mempunyai kesepakatan akan membuat kegiatan. Ada 13 program yang akan kami lakukan untuk menjalankan, dan mengawasi, dan mengawal Makan Bergizi Gratis ini.

Namun kenyataannya, kami dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala. Kendala itu terjadi, contoh, sesuai dengan pertanyaan Pak Edy tadi tentang pelibatan kami. Jujur kami tidak dilibatkan dalam hal-hal yang menurut komitmen awalnya itu seharusnya Badan POM dilibatkan. Contoh paling konkret, untuk penyiapan kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini, dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini kami tidak dilibatkan, dalam penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak. Kami tidak dilibatkan dalam hal itu.

Tentu, kami sebagai lembaga yang tentu bukan kewenangan kami menjalankan Makan Bergizi Gratis itu, domainnya, tanggung jawabnya ada di

Badan Gizi. Kami akan turun bekerja kalau dilibatkan, kan begitu logikanya. Jadi, bukan kami tidak mau bekerja untuk itu, tapi kami tidak dilibatkan untuk penanganan itu. Apa yang kami dilibatkan, dilibatkan dalam hal pemberian modul-modul untuk pelatihan itu kami dilibatkan, tetapi dalam hal yang sangat prinsip, menurut saya, itu dapurnya itu kami harus dilibatkan seharusnya.

Yang kedua, kita juga punya pengalaman dalam hal bahan-bahan asal muasal atau *raw material*-nya makanan yang akan dibagikan. Seharusnya kami juga dilibatkan. Kami juga tidak dilibatkan dalam hal seperti itu. Sementara dalam program yang kami sudah usulkan ke Bappenas dan ke Badan Gizi ada 13 program yang seharusnya kami dilibatkan, tapi kami tidak dilibatkan untuk itu. Nah, kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa, ya, karena memang itu kenyataannya.

Jadi, saya maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami, iya, kan? Karena tidak mungkin sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu. Tentu, kita bisa menggunakan kewenangan yang kami miliki sesuai dengan peraturan tentang keamanan pangan, tetapi kan kita harus sadar ada otoritas masing-masing. Jadi, kalau dalam sebuah program ini, program kerja ini adalah penanggung jawab utamanya adalah Badan Gizi. Jadi, kita menghormati hal itu bukan karena persoalan berani atau takut, tapi kita menghormati.

Nah, keberanian kami adalah menjelaskan kepada Badan Gizi ini dibutuhkan Badan POM, bukan karena kami meminta tanggung jawab, tetapi kita ingin melindungi anak-anak kita mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, kami sudah laporkan secara transparan jumlah kasus yang kami temukan, yaitu kejadian luar biasa terdapat 17 kejadian luar biasa. Itu menunjukkan bahwa kami menjalankan tupoksi kami. Kemudian, yang kedua, kami juga menjalankan kewenangan kami yang menjelaskan bahwa ada sekitar 10 provinsi, tapi tentu, ke depannya kami butuh penguatan lewat *output* supaya sinkronisasinya berjalan dengan baik.

Saya sangat mengapresiasi jika kami, antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Badan Gizi, bersama-sama di forum yang terhormat ini sehingga kita ada kesepakatan yang menjadi tanggung jawab kita bersama yang kita bisa jalankan secara lebih *fair*, karena tentu domain dan kewenangan Komisi IX ini yang bisa mensinkronisasi kami.

Selama ini, kami sudah mengusulkan ke Bappenas sebagai kementerian yang mensinkronisasi semua program kerja nasional, tetapi kelihatannya itu belum efektif. Yang efektif, saya kira, jika Komisi IX memanggil kami, dua lembaga ini, untuk bersama-sama sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih tegas sesuai dengan MoU yang telah kita tandatangani. Jadi, harapannya nanti MoU jangan hanya sekadar MoU, tapi sampai teknisnya, termasuk anggarannya,

karena semua pekerjaan membutuhkan anggaran. Tidak mungkin tim kami yang terbatas tanpa anggaran bekerja menggunakan anggaran yang juga dari Badan POM yang selama ini sudah...

F-PDI PERJUANGAN (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Interupsi, Bu Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Jadi, Bapak/Ibu, kalau kita ingat terakhir dengan BGN kan per hari ini penyerapannya baru 3,36%, ya. Jadi, ada 7 bulan untuk menghabiskan 94%, berarti 96% lagi. Jadi, anggarannya kalau ditanya ada apa enggak, ya, cukup sebenarnya untuk bisa digunakan agar bisa memastikan makanan yang diedarkan itu aman dan layak untuk dikonsumsi.

KEPALA BPOM RI (Prof. Dr. TARUNA IKRAR, M. Biomed., Ph.D.):

Jadi, jalan keluarnya itu tadi, kami dipertemukan. Saya setuju sekali, Bapak dan Ibu Pimpinan, kami dipertemukan.

Yang kedua, tentang isu yang berhubungan dengan tahu, karena ini kan perlu kami jelaskan, bahwa yang beredar video itu sebetulnya pabrik tahu, kami dapat laporan isu ini muncul sebetulnya sejak tahun 2019 dan sudah ditangani oleh Gubernur Jawa Timur. Nah, kasus yang sedang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi perizinan dan Badan POM Surabaya akan cek kembali ke lokasi. Kalau itu sudah menjadi *viral*, ya.

Nah, tetapi kami juga dari tim kami dari Badan Pengawas dan Balai-balai Besar dan balai seluruh Indonesia tentang tahu ini, kami juga sebetulnya turun ke lapangan, turun ke pasar dengan adanya yang program yang disebut dengan Pasar Pangan yang Aman. Kita ada program seperti itu dan kami turun, turunnya setiap kapan? Yaitu ada yang tiap bulan sekali melakukan *sampling*, ada yang dua kali sebulan, tergantung kapasitas personel yang kita miliki di daerah, karena memang harus dimaklumi bahwa idealnya kita punya unit pelaksana teknis itu ada di setiap datu 2, minimal ada di setiap datu 2. Unit pelaksanaan teknis kami baru ada 76 dari seluruh Indonesia, yang jumlah datu 2 kita adalah 514, ditambah 38 provinsi, tentu sangat-sangat terbatas.

Jadi, ditanya tentang bagaimana kami mengamankan pengamanan pangan khususnya menyangkut isu *tofu* atau tahu, kami sudah turun khusus untuk yang beredar isu yang muncul sebetulnya sejak 2019 menurut pengecekan kami, tapi

tentu masukan dari sini kami sudah koordinasi dengan Balai Besar Jawa Timur, Surabaya, untuk segera turun kembali. Jangan sampai sudah ditindak tahun 2019, sekarang muncul lagi, itu, tapi isu itu beredar sudah seperti itu.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Iya, interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan, Pak Surya.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Jadi memang itu sudah pernah ada isu itu, 5 tahun yang lalu sempat ditayangkan di *ABC News Australia*, sampai di Australia, tapi ini yang baru ini adalah baru video yang baru dirilis 2 minggu lalu. Jadi, ini adalah video baru, yang nanti saya kasih *link*-nya dari Andrew Fraser ini, yang dia baru melakukan video dokumenternya terbilang baru.

Begitu saja. Terima kasih, Pimpinan.

KEPALA BPOM RI (Prof. Dr. TARUNA IKRAR, M. Biomed., Ph.D.):

Jadi, terima kasih, Bapak. Kami akan cek ke lapangan untuk memastikan hal itu, tapi bukan hanya Jawa Timur, tentunya. Ini menjadi catatan kami juga untuk seluruh unit pelaksanaan teknis kita di seluruh Indonesia.

Yang ketiga, kluster berikutnya tentang vaksin. Vaksin yang didanai oleh Melinda Gates Foundation yang berhubungan dengan tuberkulosis. Saya juga ingin melaporkan bahwa hari ini kami menerima, pagi-pagi sebelum kami ke DPR, bertemu dengan tim dari Bill Gates Foundation itu dan kita temukan bahwa yang pertama, izin uji klinik atau persetujuan izin uji kliniknya telah kami keluarkan, uji klinik fase 3, dan itu landasannya sangat kuat sebetulnya. Pertama, uji klinis praklinis sudah dilakukan bertahun-tahun di Swiss. Kemudian dilanjutkan dengan uji klinis tahap 1 juga di Swiss dengan hasil yang menunjukkan aman. Kemudian pada uji fase 2 juga menunjukkan hal yang serupa, termasuk nilai dosis yang diberikan, termasuk persetujuannya untuk usia berapa diberikan.

Intinya, berdasarkan hasil *review* Komite Nasional evaluasi obat nasional di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dihadiri oleh para pakar yang independen dari seluruh Indonesia memberikan rekomendasi bahwa uji klinis fase 3 bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, saya mohon men-*declare* bahwa kita mengerti *concern* yang terjadi di lapangan. Yang jelas, berdasarkan penilaian Badan Pengawas Obat dan Makanan, kami telah menandatangani persetujuan uji klinis fase 3, dan itu tidak perlu dikhawatirkan akan karena berdasarkan *evidence*

based, berdasarkan *scientific based*, dan berdasarkan referensi sebelumnya, itu sangat dan sesuai memenuhi standar *Good Clinical Practice*.

Jadi, dengan demikian, itu telah memenuhi syarat dan tentu kami akan *men-declare* sebagai lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa uji klinis ini sudah sesuai dengan aturan, dan tentu, kita berharap keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan, karena rakyat kita sangat membutuhkan vaksin ini kalau sudah lulus uji 3-nya. Tentu, pengawasan kami akan berlanjut sampai kepada tahap pelaksanaan uji klinis dan hasil uji klinis itu juga sangat menentukan untuk nanti kami memberikan izin, izin edar jika uji klinis ini telah selesai. Saya kira, itu kluster yang ketiga yang perlu kami jawab.

Kemudian, yang berhubungan tentang pengembangan Balai Besar POM atau BBPOM. Jadi, jumlah, kita sadari bahwa jumlah personel Badan Pengawas Obat dan Makanan dari segi kepegawaian, kita sekarang jumlahnya adalah 6.700. Dari 6.700 itu, tersebar ke 76 Unit Pelaksana Teknis, dan dalam waktu dekat berdasarkan hitungan-hitungan kami, kami akan mengajukan pembentukan beberapa Loka-loka baru, termasuk Balai, Loka yang naik pangkat jadi Balai, dan Balai akan naik pangkat jadi Balai Besar ke kementerian. Termasuk ada Loka-loka baru, termasuk hal yang lain yang kami perhitungkan bahwa Pos POM kita menghidupkan kembali di daerah-daerah perbatasan, khususnya yang dibutuhkan. Bahkan, kita berpikir ada beberapa tempat di luar negeri yang kita menyiapkan untuk membuka yang disebut, standarnya mungkin seperti atase. Karena kita beri contoh beberapa, misalnya di India, dari Badan POM Amerika di situ ada khusus badan USFDA semacam atase di India, dan di Cina, dan di Amerika, di mana tempat-tempat negara yang banyak mengimpor produk-produknya ke kita dan saya kira membutuhkan ya. Kami akan kembangkan itu berdasarkan personel.

Kemudian kluster yang kelima berhubungan dengan kinerja yang hubungannya dengan sebagian kelihatan ada penurunan kinerja. Sebetulnya, penurunan kinerja, misalnya dari triwulan yang sama di tahun 2024 dengan triwulan 2025. Ada dua hal yang perlu kami sebutkan. Penurunan kinerja ini ada dua manifestasinya, bisa saja kasusnya atau masalahnya menurun. Itu sebagai contoh, ada berapa hal yang memang kasus yang berhubungan dengan produk-produk tertentu mengalami penurunan itu.

Jadi, tentu, *output* penindakan mengalami penurunan, tapi yang kedua juga, tentu, ada hubungannya dengan target yang kita ubah, karena adanya efisiensi anggaran. Kami harus jujur menyampaikan itu, karena adanya efisiensi anggaran sehingga dampaknya ada beberapa program yang menjadi program prioritas, karena kan penindakan itu membutuhkan anggaran. Jadi, tapi kami tetap ingin berkomitmen memastikan kita mengawal pengawasan keamanan, baik pangan maupun obat-obatan secara maksimal, secara optimal tentunya. Saya kira, itu beberapa hal yang kami jawab.

Kemudian, hal berikutnya yang perlu kami jawab juga hubungannya dengan ada pertanyaan yang berkembang tentang produk yang mengandung babi, tetapi akhirnya kok sudah disetujui nomor izin edarnya keluar. Kami harus jelaskan, bahwa sebetulnya, berdasarkan kewenangan kami, kami tidak menangani persoalan halal atau haram. Halal dan haram itu di, ada badan khusus yang bertanggung jawab. Kami juga tidak mengeluarkan yang namanya *product approval* halal atau haram. Jadi, bukan lembaga Badan POM yang bertugas. Tanggung jawab kami hubungannya adalah yang berhubungan dengan keamanan pangan.

Nah, sekarang kenapa ada produk yang sudah mendapat nomor izin edar, sudah mendapat *approval* halal, tapi ternyata kenyataannya mendapat ada masalah, ternyata mengandung bahan yang mengandung babi. Ini kami lakukan karena adanya kita punya kerja sama antara Badan Halal dengan Badan POM, dan kami melakukan pengecekan karena prosesnya begini, sebelum produk-produk itu disahkan oleh Badan POM, tentu ada, biasa, persetujuan dari Badan POM yang hubungannya produk itu harus menjelaskan bahwa dia tidak mengandung barang, misalnya seperti babi dan sebagainya. Nah, kalau dia mengandung babi, tetap dapat izin dari Badan POM, tapi dia harus jujur mencantumkan mengandung zat-zat tersebut.

Nah, barang-barang yang tadi sudah mendapat nomor izin edar, karena dia tidak jujur menyampaikan itu, maka kita ada program *sampling* dan pada saat *sampling* itulah kami temukan. Pada saat kami temukan produk yang mengandung itu, karena bukan kewenangan kami menarik izin dan tentang halal, ini kami melapor ke Badan Jaminan Halal. Setelah itu, dari BPJPH juga melakukan pengecekan ulang, ternyata betul menurut laboratoriumnya, dan itu domainnya tentu Pak Haikal, ya. Yang jelas, kami sudah menjalankan sesuai dengan aturan, tupoksi, dan tanggung jawab kami.

Nah, kemudian yang berikutnya, ada barang pangan yang mengandung alkohol, es krim. Kami juga jawab bahwa kami sudah melakukan pengecekan dan sebagainya, dan ternyata memang mengandung. Oleh karena itu, kami memanggil, karena itu kan yang mengandung alkohol ada aturan-aturan khusus. Kami memanggil produsen tersebut untuk menyampaikan sesuai aturannya, mengubah labelnya. Jadi, dia harus cantumkan di labelnya itu. Dia bisa menjual, tapi dia tetap mencantumkan di labelnya bahwa produk es krimnya mengandung alkohol, kan begitu. Kewenangan kami cuma sampai di situ.

Saya kira, hal-hal yang berkembang tentang kelembagaan, tentang intervensi, dan tentang penguatan peran Badan POM, termasuk tentang obat asli Indonesia yang kami ingin kembangkan, kami sangat mendukung dari Badan POM khususnya yang berhubungan dengan fitofarmaka. Kami meminta sebetulnya salah satu penyebabnya kenapa ini belum mendapat tempat di jaminan kesehatan nasional tentang obat fitofarmaka atau obat asli Indonesia yang naik kelas menjadi obat herbal terstandar dan menjadi fitofarmaka karena kelihatannya masih ada

hambatan di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 yang berhubungan tentang pembelahan itu. Ini sudah menjadi intens, saya kira, di tim akan melakukan perubahan PMK Nomor 58 itu untuk kita berharap peluang-peluang fitofarmaka ini nanti suatu ketika bisa masuk ke Jaminan Kesehatan Nasional sehingga bisa *discover* oleh BPJS dan sebagainya sehingga akan berkembang perusahaan-perusahaan ingin melakukan pengembangan lebih jauh karena *evidence based*-nya sudah keluar. Fitofarmaka itu artinya sudah lulus uji klinis 1, 2, 3 dengan efikasi yang jelas. Jadi, sebetulnya tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan fitofarmaka.

Saya kira, itu semua kami sudah jawab. Mohon maaf kalau belum terjawab. Saya kira, bisa dilanjutkan lewat penjelasan yang lebih tertulis nantinya. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Izin, Ketua. Izin.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan, Bu Netty.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Tadi sebetulnya banyak, ya, pertanyaan dari Anggota yang mengingatkan Badan POM tentang maraknya *influencer* di kanal media sosial. Menurut saya, ini juga tantangan yang enggak mudah, Bu Ketua. Kenapa? Karena maraknya *influencer* ini menganut deret ukur banyak sekali, begitu. Sementara, literasi dan edukasi yang kita lakukan merujuk pada deret hitung, 1, 2, 3, 1, 2, 3, seperti itu.

Nah, apakah kita akan terus menunggu banyaknya komplain, jatuhnya korban? Begitu. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan? Kenapa? Karena kalau menurut saya, ini pastinya harus berbanding lurus dengan partisipasi publik, partisipasi masyarakat, terkait dengan literasi tentang keamanan pangan, dan lain-lain seperti itu. Mohon dijelaskan, mungkin, langkah Badan POM.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik. Menyangkut jumlah total dari yang menjual produk ilegal. Saya kira, kita mendengar itu, ya, Bu Netty, ya. Ya, boleh dijawab silakan.

KEPALA BPOM RI (Prof. Dr. TARUNA IKRAR, M. Biomed., Ph.D.):

Terima kasih.

Intinya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk menyangkut dengan *influencer* dan *review-review* ini telah melaksanakan secara sesuai dengan wewenang kami. Kami sudah mengundang *influencer*. Kemudian, kami juga melakukan edukasi ke masyarakat yang berhubungan dengan ini. Kemudian, yang paling penting, yang terbaru sekarang, khusus untuk Peraturan Kepala Badan POM, Badan POM yang berhubungan dengan *influencer* ini sedang harmonisasi. Artinya sudah tahap dari draf, kemudian uji publik kita sudah lakukan. Kemudian, setelah itu, kita akan undang. Sekarang sudah masuk pada tahap harmonisasi, karena kan masih terkait juga dengan lintas sektoral, lintas departemen. Sekarang, kami sudah masuk ke tahap sudah ditandatangani harmonisasinya untuk dilanjutkan ke harmonisasi.

Termasuk di situ kita jelaskan apa dan bagaimana serta di mana kewenangan masyarakat, partisipasi masyarakat atau melakukan evaluasi dan pengawasan obat dan makanan, intinya begitu. Jadi, termasuk apa sanksi-sanksi yang akan kita berikan, termasuk tentu sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Jadi, jawabannya kami sangat punya atensi yang sangat besar terhadap ini dan sekarang peraturan kami sudah sedang dalam harmonisasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diundangkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Terima kasih. Bu Netty?

Baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya, kita bacakan kesimpulan sementara.

Draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia, Kamis, 15 Mei 2025. Ada beberapa poin, 8 poin:

1. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM Republik Indonesia mempercepat penerbitan regulasi untuk penguatan pengawasan obat dan makanan, termasuk penyelesaian revisi dan penerbitan peraturan baru yang mengatur evaluasi produk terapi lanjutan, risiko kontaminan, pengawasan ketat terhadap obat tertentu yang rawan disalahgunakan, dan keterlibatan masyarakat atau *influencer* dalam pengawasan publik.

Bapak/Ibu.

Poin satu ada yang mau ditambahkan atau yang ada yang mau disempurnakan kalimatnya? Kami persilakan. Kalau sepakat, saya akan ketok. Cukup?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, selanjutnya poin 2.

2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM Republik Indonesia memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal termasuk produk suplemen, kosmetik, dan pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya, serta beredar tanpa izin resmi, baik melalui platform digital maupun secara fisik, termasuk di daerah terluar dan perbatasan.

Silakan, Bapak/Ibu. Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM Republik Indonesia menindak tegas pelaku penyimpangan di bidang produksi dan distribusi obat serta pangan olahan dengan mengedepankan mekanisme penegakan hukum dan memperkuat patroli siber secara berkawal.

Bagaimana, Bapak/Ibu? Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

F-PKS (drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Ya, silakan.

F-PKS (drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si):

Sebelum ke poin berikutnya, sebagaimana pertanyaan yang sudah saya sampaikan agar dimasukkan poin tambahan Komisi IX DPR RI mendesak BPOM Republik Indonesia untuk memastikan uji klinis atau *clinical trial* pada suatu vaksin, katakanlah, yang kemarin yang tadi disampaikan kan vaksin tuberkulosis, dipastikan aman, karena filosofis hadirnya negara untuk melindungi masyarakat.

Ini penting, ya, karena ini sudah menjadi opini publik, ya, dan Pak Menkes juga kemarin melakukan diskusi dengan, *podcast* dengan media terkait dengan hal ini.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik, Pak, kita masukkan, tapi kita belum selesai. Baik, kita bisa rumuskan untuk kalimat yang Pak Ru'yat inginkan agar bisa terekam dalam rapat ini. Yang lain dulu ya, Pak, ya.

Untuk poin 3, saya baca kembali.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM Republik Indonesia menindak tegas pelaku penyimpangan di bidang produksi dan distribusi obat serta pangan olahan dengan mengedepankan mekanisme penegakan hukum dan memperkuat patroli siber secara berkala.

Setuju, ya, Bapak/Ibu?

(RAPAT : SETUJU)

Yang keempat.

4. Komisi IX DPR RI dari mendesak Badan POM Republik Indonesia memastikan proses uji klinik produk obat dan vaksin mengikuti *Good Clinical Practice* atau GCP sehingga hasilnya dipastikan aman, berkhasiat, dan bermutu.

Cukup, Pak?

(RAPAT : SETUJU)

Yang kelima.

5. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM Republik Indonesia terlibat secara aktif untuk memastikan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan memperkuat sistem pengawasan dari hulu ke hilir, termasuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik atau CPPOB, pelatihan petugas pengolah pangan, serta pengujian laboratorium terhadap kasus-kasus dugaan Kejadian Luar Biasa atau KLB keracunan pangan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep.):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan, Pak Edy.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep.):

Kalau ini kan sudah dilakukan selama ini dari laporan BPOM, tetapi maksud saya, melalui penerapan CPPOB itu implementasi apa? Ini harus lebih tegas. Menurut saya, melalui apa, ya, sebelum BGN itu memberikan izin pada SPPG, CPPOB itu dilakukan dulu sebagai syarat. Nah, menurut saya itu, itu lebih punya otoritas yang lebih kuat. Itu, Mbak Ifa, coba dikonsep.

F-P. GERINDRA (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Izin.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan.

F-P. GERINDRA (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Mungkin kami minta juga konfirmasi dari Badan POM, sejauh mana, sih, sebenarnya keterlibatan aktifnya ini. Kan memang kan selama ini kan sudah ada pertemuan, MoU, ya, ini seberapa kuat MoU bisa menjadi dasar kerja sama, lah, antara Badan POM dengan BGN, begitu. Ini mohon dipastikan dulu sehingga nanti enggak rancu juga kita di kesimpulannya. Jangan-jangan sama sekali belum diterapkan, Pak Edy, ya, atau memang sudah diterapkan, begitu, lho. Silakan, Pak Kepala.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan, Pak Kepala Badan.

KEPALA BPOM RI (Prof. Dr. TARUNA IKRAR, M. Biomed., Ph.D.):

Iya, terima kasih. Seperti yang saya, kami kemukakan sebetulnya kami punya MoU akan melakukan 13 kegiatan. Namun, dalam kenyataannya, poin keterlibatan kami itu masih tidak maksimal. Tidak maksimal dalam hal apa? Artinya, tidak semua dari poin kerja sama itu kami dilibatkan. Ada sebagian kami tidak dilibatkan sesuai dengan, contohnya, untuk prosedur kan seharusnya tanggung jawab kami seperti memastikan bahwa pangan yang dimakan anak-anak kita itu aman, itu seharusnya kami dilibatkan dalam hal mulai penyiapannya sampai dengan proses pembuatannya. Nah, itu kami tidak dilibatkan. Contoh paling penting keterlibatan kami, itu adalah untuk menentukan dapurnya sudah layak atau tidak, karena kan kita punya pengalaman, punya kompetensi di situ. Itu kami tidak dilibatkan. Jadi, kami menyambut gembira seandainya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Belum dilibatkan, ya, Pak?

KEPALA BPOM RI (Prof. Dr. TARUNA IKRAR, M. Biomed., Ph.D.):

Dilibatkan untuk itu karena kami belum dilibatkan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Belum dilibatkan.

Pak Edy, jadi ada poin ketujuh nanti. Kami akan mengundang secara resmi, mengadakan rapat dengan BGN bersama dengan Badan POM, supaya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk keterlibatan langsung di dalam kita bicarakan di sini. Ada poinnya, Pak.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep.):

Ya, memang ini harus ada keterlibatan kedua belah pihak. Jadi, nanti kalau kita klaim saat ini tanpa ada BGN, dianggap *overlap* nanti.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep.):

Begitu, Pak, tapi bahwa *message*-nya itu begitu, Pak.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya sudah dimasukkan dalam poin ketujuh, kurang lebih.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep.):

Oke, berarti PR-nya ada di Bu Ketua ini.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Pak Edy.

F-P. GERINDRA (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Iya.

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan.

F-P. GERINDRA (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Saya enggak tahu, mungkin poin lima ini lebih tepatnya adalah untuk, karena kalau keterlibatan ini juga belum sepenuhnya terlibat, begitu, ya. Jadi, saya kira, kita mendesak untuk bisa terus berkoordinasi, ya, memastikan, lah, keamanan dan itu sampai terakhir apa, Pak. Artinya koordinasinya tetap dijalankan, sambil tentunya nanti ke depan kita coba untuk mengagendakan lebih lanjut, mempertemukan antara Badan POM dengan Badan Gizi Nasional.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Saya baca, ya.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHOJONO, M.M.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHOJONO, M.M.):

Jadi, ini sebetulnya kuncinya di Badan POM, karena beliau belum dilibatkan, jadinya tidak bisa melakukan apa-apa. Cuma tanggung jawab Pak Kepala Badan sudah MoU, ya. Sudah MoU, cuma hanya MoU saja karena hanya MoU saja kita bukan anu, ya, mendorong dan bantu Pak Badan POM ini supaya dilibatkan. Namun demikian, kalau di memastikan proses uji klinis produk, dalam rangka, ya, *sorry, sorry* nomor lima.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Nomor lima, Pak.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHOJONO, M.M.):

Nanti yang salah Badan POM. Kasihan beliau, beliau tidak dilibatkan. Ada MoU enggak dilibatkan, ada MoU tidak dilibatkan seperti tadi Pak Edy. Kalau bisa Komisi IX mendesak Badan POM RI berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional sesuai dengan MoU yang disepakati. Soalnya kan sudah tanda tangan MoU,

isinya Bapak kan sudah tanda tangan MoU, ya. MoU-nya, iya *toh?* Iya, sesuai dengan MoU agar Bapak aman juga. Sebenarnya kalau ada, kemarin kalau Bapak, lo, ini kok enggak *kerjo* kan begitu, tapi kan enggak bisa kerja karena enggak diajak. Diingatkan, Pak.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep.):

Ya, saya berpikir bahwa yang punya pekerjaan BGN, ini diajak untuk bekerja sama. Nah, tentu kalau *power* permintaan dari Badan POM, enggak akan kuat, Bu Ketua. Karena itu, ini dorongan Komisi IX, maksud saya seperti itu sehingga nanti ada perhatian serius dari BGN, tapi ya saya setuju kalau Bu Ketua mau mengagendakan mempertemukan antara BGN dan BPOM itu jauh lebih bagus.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Ada untuk berkoordinasi, Pak Edy, poin 5. Saya baca untuk poin 5.

5. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM Republik Indonesia berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional sesuai dengan MoU (*Memorandum of Understanding*) untuk memastikan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat sistem pengawasan dari hulu ke hilir, di antaranya melalui:
 - a. memastikan pelaksanaan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik atau CPPOB dipenuhi sebelum izin Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG diberikan;
 - b. pelatihan petugas pengolah pangan;
 - c. pengujian laboratorium terhadap kasus-kasus dugaan kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan.

Bagaimana, Bapak/Ibu? Kita berharap ini masuk dalam MoU.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Jadi, anu, ini kita memperkuat BPOM?

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya, silakan, Pak Heru.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Jadi, sebenarnya, sebetulnya Badan Gizi Nasional itu programnya Makan Bergizi Gratis, tapi dengan MoU-nya Badan POM dengan BGN, tidak bisa *delivery* kalau Badan POM enggak mungkin ini sehat, ini bisa bergerak, ini bisa diedarkan, sesuai yang disampaikan Pak Kepala Badan tadi.

Jadi, makanan ini harus diedarkan ya seizin Badan POM, karena jumlahnya cukup besar, dan itu *makane* dan ini memang susah. Oleh sebab itu, ditambahi yang D termasuk di hilirnya ya. Iya, D, ditambahi D, D-nya ada tambah D. Jadi, sampai makanan ini ter-*delivery* ke masyarakat, produk dari Badan POM, eh BGN itu.

F-P. GERINDRA (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Izin.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHHONO, M.M.):

Setelah diverifikasi oleh Badan POM baru. Jadi, memang kuncinya di Badan POM, maka dari itu, Badan POM juga harus punya, kejar, seperti Bu Ketua tadi. Yang nomor tujuh, ditemukan, lah, dengan Pak (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan, Bu.

F-P. GERINDRA (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Izin, Bu Ketua.

Saya enggak tahu ini poin A, B, C ini apakah sudah ada di MoU. Kalau memang sudah ada, saya kira, enggak perlu lagi kita masukkan terlalu teknis di sini. Biar nanti antar-kedua badan atau lembaga ini saja yang, saya kira, urusan teknis bisa lebih menyesuaikan, begitu, ya, karena jangan sampai tidak implementatif juga, Pak Heru, karena kita tahu Badan POM juga ini kan secara kelembagaan juga belum sampai ke tingkat, yang Loka pun, kabupaten/kota juga baru terbatas begitu, ya. Kalau nanti pengawasan sampai ke pengiriman makanan ke penerima program, ini apakah benar-benar bisa dijalankan oleh Badan POM atau enggak?

Jadi, jangan sampai nanti karena ini belum mampu untuk dijalankan, nanti menghambat Program MBG-nya. Jadi, saya kira, untuk hal-hal teknis enggak perlu dicantumkan. Cukup sesuai dengan MoU saya kira sudah memahami tupoksinya masing-masing begitu. Usul saya begitu. Silakan, Bapak/Ibu yang lain.

F-PKB (H. ASEP ROMY ROMAYA, S.E.):

Izin, Pimpinan, mau menambahkan. Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Oh, iya siap silakan, Pak Asep, saya cari-cari. Silakan, Pak Asep.

F-PKB (H. ASEP ROMY ROMAYA, S.E.):

Setelah saya telaah, mungkin ini sebagai masukan, antara BPOM dengan BGN, itu kesepakatannya ketika sudah ketemu atas dorongan Komisi IX. Jadi, menghasilkan kesepakatan. Jadi, tertuang kesepakatan antara BGN dengan BPOM. Itu nanti ada kesepakatan yang didorong oleh Komisi IX. Menurut saya seperti itu, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Istilah konkret untuk masuk dalam kesimpulan seperti apa? Apakah cukup seperti ini, Pak Asep?

F-PKB (H. ASEP ROMY ROMAYA, S.E.):

Mungkin, menurut saya, tepatnya setelah ketemu antara BPOM dengan BGN.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Oh iya, ada di poin 7, sudah ada.

F-PKB (H. ASEP ROMY ROMAYA, S.E.):

Iya, itu, kesepakatan yang terlalu itu. Bukan apa-apa, ketika kita terlalu dalam, kan belum ada kesepakatan antara BPOM dengan BGN itu.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan, Bu Netty.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Iya. Menurut hemat saya, setuju dengan pendapat Bu Putih Sari tadi, ya, bahwa kita cukup sampai pada tadi, ya, hal besarnya. Kenapa? Karena kalau kita detailkan, justru boleh jadi, ada sesuatu yang tidak ter-cover, ya, dalam poin tersebut. Jadi, biarkan saja seperti itu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Iya. Jadi, tidak dikunci. Silakan, Pak Edy.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep.):

Saya setuju dengan Bu Putih Sari, karena di situ memasukkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019. Cukup itu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Cukup, ya?

F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep.):

Cukup itu, karena itu isinya luas kan, plus MoU, kan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik. Jadi, poin 5 disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, sekarang kita naik lagi poin 6.

6. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM Republik Indonesia mengevaluasi perizinan produk yang mengandung alkohol dan tidak halal serta memperkuat kerja sama lintas lembaga terutama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat.

Bagaimana, Bapak/Ibu, setuju? Enggak, itu di BPJPH, ya. Setuju, ya?

(RAPAT : SETUJU)

Yang ketujuh.

7. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM Republik Indonesia mengakselerasi integrasi obat bahan alam (OBA) ke dalam sistem layanan kesehatan nasional, khususnya dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui peningkatan regulasi, edukasi tenaga kesehatan, dan insentif terhadap industri dalam negeri.

Bagaimana, Bapak/Ibu?

F-P. GERINDRA (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Iya, saya enggak tahu ini apakah tupoksinya BPOM untuk bisa memasukkan itu ke dalam JKN atau tupoksinya Kementerian Kesehatan, ya, untuk mana-mana obat yang memang masuk ke dalam program JKN, tapi saya kira kalau untuk berkoordinasi, ini bisa.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Saya baca kembali, ya, Bapak/Ibu.

7. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM Republik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait mengakselerasi integrasi obat bahan alam (OBA) ke dalam sistem layanan kesehatan nasional, khususnya dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui peningkatan regulasi, edukasi tenaga kesehatan, dan insentif terhadap industri dalam negeri.

Bagaimana, Bapak/Ibu? Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Sudah, ya, tidak mengganti makna dari kalimat di poin 7.

Yang kedelapan.

8. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM Republik Indonesia memastikan transparansi dan keterbukaan informasi publik di seluruh unit kerja BPOM, termasuk kemudahan akses masyarakat terhadap informasi keamanan produk obat dan makanan yang berbasis bukti data *real time* serta respons cepat atas laporan konsumen.

Bagaimana, Bapak/Ibu? Poin terakhir? Ya, cukup, ya?

(RAPAT : SETUJU)

Selanjutnya,

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Izin, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Oh, masih ada, ya? Ya, lanjut dulu, deh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Ya, yang kesembilan.

9. Komisi IX DPR RI akan mengadakan rapat dengan Badan POM Republik Indonesia, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk membahas berbagai hal terkait pelaksanaan Program MBG.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHHJONO, M.M.):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan, Pak Edy.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHHJONO, M.M.):

Yang nomor 9 termasuk juga Kementerian Kesehatan, Ketua, karena soal KLB ini kan wilayahnya Kementerian Kesehatan, tuh. Kalau kementerian sudah menentukan KLB, pasti penanganannya kan ada di Kementerian Kesehatan. Maka menurut saya, tambahkan saja itu sekaligus dengan Kementerian Kesehatan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik, Pak Edy. Silakan.

Saya baca kembali poin 9.

9. Komisi IX DPR RI akan mengadakan rapat dengan Badan POM Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia untuk membahas berbagai hal terkait pelaksanaan Program MBG.

Cukup, Bapak/Ibu? Cukup? Saya ketuk, ya.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Izin, Bu Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Oh, silakan, Bu Netty.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Iya. Meskipun tadi saya enggak ikut menanyakan, tadi beberapa ada yang mengingatkan tentang pentingnya kemandirian dan ketahanan obat itu tadi, ya, karena kita masih memiliki ketergantungan obat dan bahan baku obat, ya. Jadi, mungkin bisa ditambahkan bagaimana mendorong peran Badan POM. Dibantu coba.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan, dibantu untuk redaksi tambahan yang poin 10, ya.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHOJONO, M.M.):

Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Masuk ke 9. Silakan, Pak Heru.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHOJONO, M.M.):

Nomor 10 itu apa enggak bisa ditambah? Jadi, untuk mengoordinasikan beberapa kementerian, bukan hanya BGN dan BPOM, termasuk badan, Kementerian Kependudukan, peraturan bersama menteri untuk iya, PBM (Peraturan Bersama Menteri).

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Silakan, silakan, Bu Putih.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHOJONO, M.M.):

Iya, bagaimana, Bu?

F-P. GERINDRA (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Iya. Mungkin itu nanti kita lihat pada saat pertemuan, ya, Pak.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHOJONO, M.M.):

Iya. Tadi dimasukkan di situ, dimasukkan di yang 10 itu.

F-P. GERINDRA (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Enggak, saya pikir, itu nanti pada saat kita pertemuan rapat dengan semua pihak. Baru apakah memerlukan kita dorong untuk adanya peraturan bersama atau seperti apa.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Karena kalau MoU yang setelah disampaikan Kepala Badan tadi, ternyata Kepala BPOM kan enggak diajak. Lah, MoU itu, PBM itu lebih kuat daripada MoU. Jadi, Bapak nanti mesti harus diajak terus di dalam rangka penanganan Makanan Bergizi Gratis.

F-P. GERINDRA (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Seingat saya, pernah ada kesimpulan rapat bersama BGN untuk mendorong Perpresnya, Pak, Perpres terkait dengan keterlibatan K/L dalam Program MBG, begitu. Jadi, mungkin nanti kita dorong lagi pada saat setelah pertemuan.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Ya, pada prinsipnya, Pak BPOM harus lebih kuat.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik, saya baca yang 9, ya.

9. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM Republik Indonesia memperkuat peran dan kewenangannya dalam percepatan pengembangan industri farmasi di dalam negeri guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional.

Cukup, Bapak/Ibu, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu.

Dengan demikian, kesimpulan sementara di internal sudah selesai. Kita lanjut ke mitra kerja kita untuk bisa melihat kembali poin per poin, apakah ada perubahan atau sudah bisa diterima seperti ini. Kami persilakan.

KEPALA BPOM RI (Prof. Dr. TARUNA IKRAR, M. Biomed., Ph.D.):

Saya kira, kami bisa menerima.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Sudah baca satu-satu, Pak, semuanya?

KEPALA BPOM RI (Prof. Dr. TARUNA IKRAR, M. Biomed., Ph.D.):

Iya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Sudah, ya, sudah mengikuti, ya, tadi.

KEPALA BPOM RI (Prof. Dr. TARUNA IKRAR, M. Biomed., Ph.D.):

Ya, seperti misalnya yang nomor 1 memang sudah kita harmonisasikan, tidak apa-apa diperkuat lagi, silakan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Jadi, diterima, ya, Pak? Sudah, ya.

KEPALA BPOM RI (Prof. Dr. TARUNA IKRAR, M. Biomed., Ph.D.):

Iya, diterima.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Baik. Terima kasih.

Dengan adanya koreksi berupa masukan dan saran dari forum, apakah rumusan ini dapat menjadi kesimpulan rapat hari ini? Bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian, rumusan kesimpulan dapat disetujui menjadi keputusan rapat pada hari ini dan akhirnya kami, atas nama Pimpinan beserta segenap Anggota Komisi IX DPR RI, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bilamana terdapat hal yang kurang berkenan.

Sebelum rapat kami akhiri, kami persilakan untuk Kepala Badan menyampaikan sepatah dua kata sebagai kata penutup. Waktu kami berikan.

KEPALA BPOM RI (Prof. Dr. TARUNA IKRAR, M. Biomed., Ph.D.):

Terima kasih atas kesempatan dan masukan yang luar biasa dari para Pimpinan dan Anggota Komisi IX kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi kami. Semoga, masukan-masukan, termasuk keputusan 10 poin tadi, bisa semakin memperkuat peran, fungsi, dan kewenangan kami di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, dan kami sebagai eksekutif akan menjalankannya secara maksimal.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX):

Terima kasih, Pak Kepala Badan. Sebelum rapat ini saya tutup, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.

(BERDOA)

Berdoa selesai. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat saya tutup.

*WAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om shanti shanti om
Namo buddhaya.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.22 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

Ttd

**Ida Nuryati, S.Sos., M.A.
NIP.197604011998032002**